



REVIU RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

KECAMATAN
GEDANGAN

KABUPATEN SIDOARJO



BERITA ACARA
HASIL PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Nomor : 188/ 41/438.7.4/2023

Pada hari ini Senin tanggal 16 Bulan Januari Tahun 2023, kami Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Camat Gedangan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/36/438.7.4/2023, tanggal 4 Januari 2023 telah melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

a. Uraian Tujuan dan Indikator Sebelum Review

TUJUAN (Sebelum Perubahan)	TUJUAN (Setelah Perubahan)	KETERANGAN
Tujuan (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Kententraman dan Ketertiban Umum)	Tujuan (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Kententraman dan Ketertiban Umum)	Tetap
Indikator : a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Indikator : a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Tetap
SASARAN (Sebelum Perubahan)	SASARAN (Sesudah Perubahan)	
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tetap

Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan	Indikator Kinerja : a. Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan b. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) c. Nilai RB d. Nilai IPP e. Presentase Penyerapan Anggaran	Baru
Sasaran 2 : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran 2 : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tetap
Indikator Kinerja : Presentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi	Indikator Kinerja : Presentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi	Tetap

1. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
Nilai SKM Kecamatan	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman http://ikm.sidoarjo.go.id/ . Dengan range penilaian sebagai berikut a. 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik

	<p>2. Pemohon / penerima layanan mengisi kuesioner melalui website http://ikm.sidoarjokab.go.id/. Nilai akan otomatis generated by system.</p>	<p>b. 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik c. 76,61 – 88,30 (B) = Baik d. 88,31 – 100,00 (A) = Sangat baik</p>
Nilai SAKIP	<p>1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat</p>	<p>Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30
Nilai RB	<p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat</p>	<p>Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform</p>
Nilai IPP	<p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan</p>	<p>Indeks penilaian sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup

	Publik 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik	(Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima
Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Realisasi anggaran perangkat daerah yang dicapai ----- ----- x 100% Jumlah anggaran perangkat Daerah dalam satu tahun	Laporan realisasi anggaran kecamatan

2. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Perubahan

Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan	70.9	80 (A)	80 (A)	80.1 (A)	80.2 (A)	80.3 (A)	80.4 (A)

c. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Perubahan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDIS I AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1. Tahapan 2. Rekomendasi		1. 2 Tahapan 2. 2 Rekomendasi	1. 2 Tahapan 2. 2 Rekomendasi	1. 2 Tahapan 2. 2 Rekomendasi	1. 2 Tahapan 2. 2 Rekomendasi	1. 2 Tahapan 2. 2 Rekomendasi
Persentase realisasi anggaran PD	%		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
a. Persentase BMD PD yang telah teregistrasi b. Persentase BMD PD yang telah tersertifikasi	a. % b. %		a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%
Jenis BMD yang diadakan	buah		65 buah	65 buah	65 buah	65 buah	65 buah
Prosentase alat dan bahan penunjang yang disediakan	%		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit
1. Jumlah permohonan IMB rumah tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400 m2 yang diterbitkan 2. Jumlah laporan hasil Money bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasayarakatan, pembangunan dan lingkungan hidup	1. berkas 2. Laporan 3. laporan		1.75 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.80 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.85 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.90 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.100 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan

3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun							
Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar	Berkas		75 Berkas	80 Berkas	85 Berkas	90 Berkas	100 Berkas

d. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Perubahan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan 2. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	1. dokumen 2. dokumen		1. N/A 2. N/A	1. 5 dokumen 2. 8 dokumen	1. 5 dokumen 2. 8 dokumen	1. 5 dokumen 2. 8 dokumen	1. 5 dokumen 2. 8 dokumen
Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	%		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
a. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi b. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	a. % b. %		a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai		N/A	89.1 Nilai	89.1 Nilai	89.1 Nilai	89.1 Nilai
Jumlah BMD yang diadakan	Jenis		N/A	108 Jenis	108 Jenis	108 Jenis	108 Jenis
Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%		N/A	100 %	100 %	100 %	100 %

Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	%		N/A	80%	80%	80%	80%
1. Jumlah permohonan IMB rumah tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400 m2 yang diterbitkan 2. Jumlah laporan hasil Money bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasayarakatan, pembangunan dan lingkungan hidup 3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	1. berkas 2. Laporan 3 laporan		1.75 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.0 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.0 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.0 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.0 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan
Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar	Berkas		75 Berkas	0 Berkas	0 Berkas	0 Berkas	0 Berkas

Dari hasil Perubahan Renstra tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Perubahan Renstra PD ini digunakan sebagai masukan dalam reviu RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026
2. Rencana strategis tahun 2021-2026 masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
3. Rencana strategis tahun 2021-2026 masih dapat dihunkan/ relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Demikian kesimpulan hasil Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Kecamatan Gedangan di Tahun 2023 ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
SIDOARJO

Dr. HERI SOESANTO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680519 198803 1 002

Sidoarjo, 16 Januari 2023

SAMAT GEDANGAN



INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

Pembina Tingkat I

NIP. 197709204 199701 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan
Telepon 031-8941060 / 031-8010460
Email : gedangan@sidoarjokab.go.id Website :
<http://gedangan.sidoarjokab.go.id>
GEDANGAN - 61254

KEPUTUSAN
CAMAT GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/ 36/438.7.4/2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026
KECAMATAN GEDANGAN

CAMAT GEDANGAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan penyempurnaan ukuran kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan reviu/ penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Gedangan, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Kecamatan Gedangan melalui Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 90);
 14. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019;
 15. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
25. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
26. Peraturan bupati Sidoarjo No. 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
27. Peraturan bupati Sidoarjo No. 77 Tahun 2022 Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
28. Peraturan bupati Sidoarjo No. 80 Tahun 2022 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Kecamatan Gedangan.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan;

- c. Permasalahan dan Isu Strategis;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Rencana dan Program serta Pendanaan;
- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. Penutup; dan
- i. Lampiran.

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) beserta perubahannya.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terdapat perubahan pada Rencana Program, Kegiatan dan Matriks Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan dan perubahan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan, program, kegiatan, serta sub kegiatan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GEDANGAN
Pada tanggal : 4 Januari 2023



CAMAT GEDANGAN

INEKI DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

Pembina Tingkat I

NIP. 197709241997012001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

**REVIU RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KANTOR KECAMATAN GEDANGAN
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkenannya Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gedangan 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gedangan 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Gedangan 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat hal tersebut, maka semua Pejabat Struktural dan staf Kecamatan Gedangan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 yaitu "**Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan**"., maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Gedangan periode 2021-2026.



Akhir kata, semoga Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sidoarjo, 16 Januari 2023



KECAMATAN GEDANGAN

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

Perbina Tingkat I

NIP. 19770924 199701 2001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR BAGAN	7
IKHTISAR EKSEKUTIF	8
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Maksud dan Tujuan.....	12
1.3 Landasan Hukum.....	12
1.4 Hubungan Antar Dokumen.....	19
1.5 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	21
2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedangan.....	29
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangan.....	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	47
2.5 Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).....	49
2.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDANGAN	
3.1 Identifikasi Permasalahn Berdasarkan Tugas & Fungsi PD.....	51
3.2 Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	54
3.3 Telaah Renstra Kabupaten Sidoarjo.....	57
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	60
3.5 Penentuan Isu – Isu Srategis.....	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah.....	64
4.2 Tujuan dan Sasaran.....	65



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangan	68
5.2	Program dan Kegiatan Kecamatan Gedangan.....	70
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		73
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		85
BAB VIII PENUTUP		87

LAMPIRAN

1. Matrik Renstra 2021-2026
2. Cascading / Pohon Kinerja
3. Surat Keputusan Tim Penyusun



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel 2.2.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	30
Tabel 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	30
Tabel 2.4.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Tabel 2.5.	Sarana dan Prasarana.....	33
Tabel 2.6.	Matrik Pencapaian Kinerja	35
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan.....	45
Tabel 2.8.	Matrik Tantangan dan Peluang	47
Tabel 2.9.	Telaah Renstra RTRT	49
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan	52
Tabel 3.2.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	53
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan	56
Tabel 3.4.	Kriteria Pembobotan	62
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gedangan	66
Tabel 5.1.	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangan	70
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan	74
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	86



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Gedangan 28



IKHTISAR EKSEKUTIF

Melalui penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan ini, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Gedangan. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Gedangan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Renstra yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu pendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi Renstra adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah. Renstra memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra pada dasarnya merupakan penjabaran dari RJPMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis. Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (Renja). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh



Organisasi Pemerintah Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Periode Tahun 2021–2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi Renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Melalui penyusunan Renstra ini, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Gedangan. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Organisasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian Kecamatan Gedangan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

Mengingat hal tersebut, maka semua Pejabat Struktural dan staf Kecamatan Gedangan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 yaitu "**Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan**", maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Dengan demikian tujuan dan target Renstra tahun 2021-2026 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Sidoarjo di tahun berkenaan serta merupakan sasaran akhir (*the ultimate goals*) pada Renstra. Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 memiliki tantangan pembangunan yang cukup berat akibat pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa memiliki dampak yang lebih berat jika dibandingkan dengan daerah lain yang struktur ekonominya bertumpu pada sektor primer seperti pertanian. Dengan demikian, selaras



dengan prioritas nasional maka arah kebijakan pembangunan ke depan akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan sosial.

RPJMD memiliki keterkaitan sistemik dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah rumusan visi, misi dan program strategis dimanifestasikan ke dalam dokumen RPJMD, maka rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan target Program Pembangunan Daerah beserta kebutuhannya. Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dimana RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target dalam Renstra Perangkat Daerah, demikian pula target RKPD diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kondisi Kecamatan Gedangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang prima;
2. Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gedangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Gedangan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai dengan Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan adalah untuk :

1. Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026;
2. Menjelaskan uraian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan Tahun 2026, dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Sidoarjo;
3. Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Camat Gedangan setiap akhir tahun anggaran dengan tolok ukur masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

1.3. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Vii/Mpr/2001 Tentang Visi Dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari



- Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Telah Diubah Lagi Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ”;
 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
 19. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor : 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;



21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo;
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo;
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Pemendagri 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



30. Pemendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Pemendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Pemendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019;
33. Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019;
34. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
40. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;

41. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
42. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
43. Peraturan bupati Sidoarjo No. 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
44. Peraturan bupati Sidoarjo No. 77 Tahun 2022 Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
45. Peraturan bupati Sidoarjo No. 80 Tahun 2022 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;



1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Rencana Strategis harus diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo, RPJMN, RTRW Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW Daerah lain yang berbatasan, dan RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab dan lampiran yang memuat Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan Kecamatan Gedangan masa kini, kelemahan dan kekuatan internal, peluang dan tantangan eksternal, rumusan permasalahan strategi yang dihadapi masa kini, rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi Kecamatan Gedangan serta rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDANGAN

Menguraikan analisis lingkungan internal dan eksternal serta isu-isu strategis pembangunan Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gedangan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang sampai dengan Tahun 2021.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat indikator kinerja Kecamatan Gedangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Memuat pedoman Indikator Kinerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Gedangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan mengenai Renstra Kecamatan Gedangan merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Gedangan, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Gedangan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Camat selaku pimpinan Kecamatan Gedangan.

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidoarjo berbunyi sebagai berikut:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengenai masing-masing unsur di dalam struktur organisasi Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya. Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat berwenang menerbitkan dan menandatangani:

- a. IMB sesuai kewenangan;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara;



- c. Legalitas salinan dokumen kependudukan
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV dan AKV);
- e. Rekomendasi izin penutupan/ penggunaan jalan lokal/desa.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan kegiatan kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, rumahtangga perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dibagi menjadi beberapa sub bagian yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam menerjemahkan rincian-rincian tugas kesekretariatan. Sub Bagian tersebut antara lain:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. Mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.



Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- 2) Melaksanakan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- 3) Menerima Permohonan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan
- 4) Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat
- 5) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 6) Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan Teknis Kegiatan dibidang Pemerintahan;
 1. Pengesahan Pengantian antar waktu dan Pemberhentian karena
 2. Pengantian antar waktu anggota Badan Permusyawarah Desa
 3. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa



4. Pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawarah desa
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas bidang pemerintahan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugasnya

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban secara *ex officio* sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum antara lain ;
 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
 2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
 3. Pengawasan dan penertiban usaha (bangunan /reklame liar)
 4. Penanganan Konflik sosial
- c. Memproses Permohonan Izin Gangguan usaha mikro
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketentraman dan ketertiban;
- e. Pelaksanaan Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan serta pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
- f. Pelaksanaan Tugas bidang lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya



5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian. Seksi Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang perekonomian;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang perekonomian;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang perekonomian;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian;
- e. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pedesaan;
- f. Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
- g. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- h. Pelaksanaan pengelolaan data profil desa dan kelurahan
- i. Penyelenggaraan penyuluhan penumbuhan wira usaha baru;
- j. Penciptaan hubungan kemitraan antara industri kecil, menengah dan besardengan lembaga ekonomi pedesaan;
- k. Penataan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL);
- l. Promosi produk industri dan dagang kecil dan mikro;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan rencana kerja di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM dan politik;
- f. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT);
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dalamPeningkatan Ekonomi Lokal(P3EL);
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan
- i. ProgramKecamatanRamah Anak (CaRa);
- j. Pengkoordinasian peningkatan keikutsertaan masyarakat ber-KB, termasuk kesetaraan dan keadilan gender partisipasi KB pria;
- k. Pelaksanaan pembinaan kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)
- l. Pengkoordinasian pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta pencegahan generasi muda dari ancaman HIV/AIDS;
- m. Pelaksanaan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidangtugasnya.

7. Seksi Pembangunan Fisik

Seksi Pembangunan Fisik mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan fisik. Seksi Pembangunan Fisik dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Fisik yang berkedudukan di bawah dan



bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang pembangunan fisik;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan fisik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pembangunan fisik;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan fisik;
- e. Pemeliharaan rutin jalan lokal desa;
- f. Pemeliharaan dan pengawasan jalan lingkungan dan drainase mikro diwilayah pennukiman;
- g. Melaksanakan gerakan penanaman pohon lindung di ruang milik jalandes;a;
- h. Pembinaan dan pengelolaan sampah sampai ke transfer depo (TPS);
- i. Inventarisasi data aset milik pemerintahan daerah;
- j. Pemeliharaan saluran tersier;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidangtugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

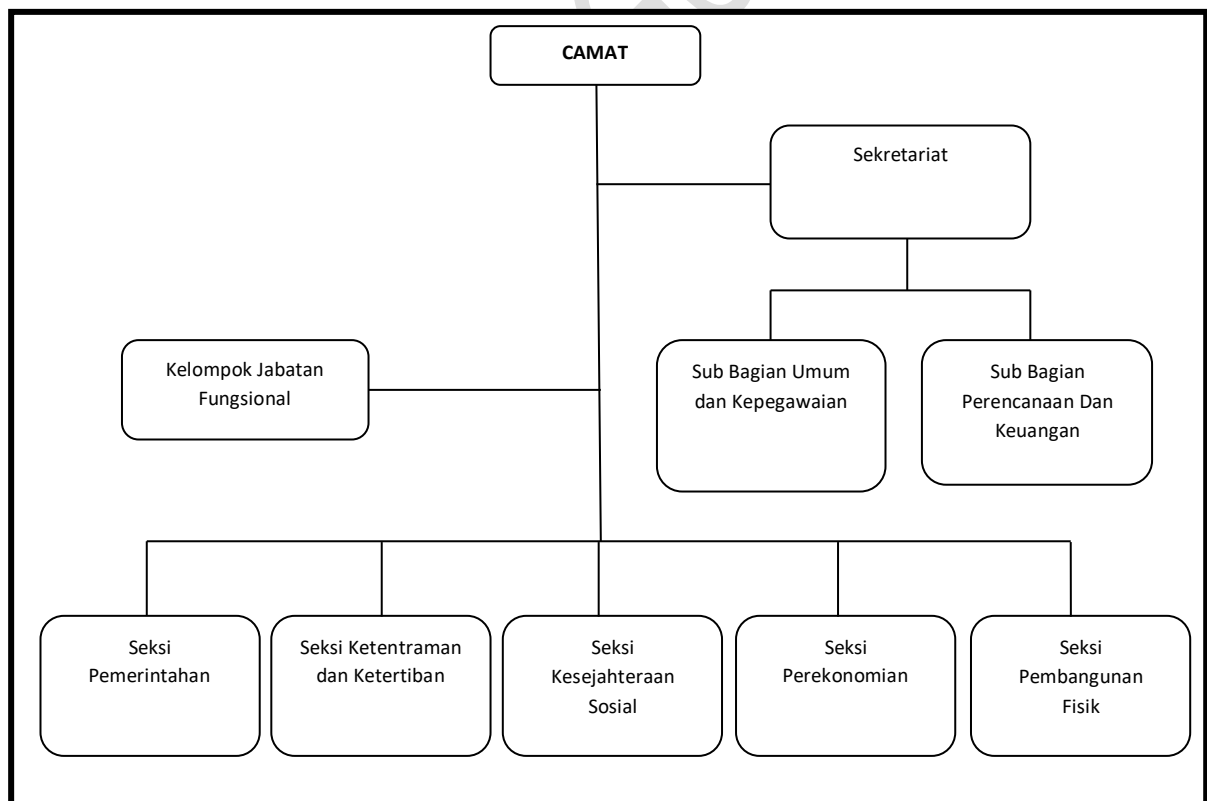
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan Gedangan terdiri dari :



- a. Unsur Pimpinan : Camat
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Camat
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi terdiri dari :
 - Seksi Pemerintahan
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - Seksi Pembangunan Fisik
 - Seksi Kesejahteraan Sosial
 - Seksi Perekonomian
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Gedangan





2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN GEDANGAN

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sumber Daya Perangkat Daerah adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi dan sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya serta aset dan potensi yang berfungsi sebagai modal dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata fisik dan non fisik dalam merealisasikan tujuan organisasi. Susunan kepegawaian di Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	GOLONGAN								HONORER			JUMLAH
		IV		III		II		I		L	P	Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P				
1	CAMAT		1										1
2	SEKRETARIAT	1		1	2	1				4	4	8	13
3	SEKSI PEMERINTAHAN			1		1				1		1	3
4	SEKSI PEMBANGUNAN FISIK					2				4		4	6
5	SEKSI KESOS			1	1						1	1	3
6	SEKSI TRANTIB			1		5				5		5	11
7	SEKSI PEREKONOMIAN			1	1							0	2
	JUMLAH	1	1	5	3	9	0	0	0	0	0	19	39



Jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Gedangan sebanyak 37 orang dengan rincian:

1. Pegawai Berdasarkan Jabatan:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1	PEJABAT STRUKTURAL	4	3	7
2	STAF /ASN	10	2	12
3	TENAGA TEKNIS / FUNGSIONAL		1	1
4	PENGAMANAN KANTOR / NON ASN	3		3
5	KEBERSIHAN DLHK / NON ASN	4		4
6	HONORER / NON ASN	9	3	12
	JUMLAH	30	9	39

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan jabatan didukung oleh 39 orang dengan rincian 7 orang sebagai pejabat struktural, 12 orang sebagai staf, 1 orang sebagai tenaga teknis/fungsional, 3 orang sebagai pengaman kantor, 4 orang sebagai petugas kebersihan DLHK / Non ASN dan 12 orang sebagai tenaga honorer/Non ASN orang sebagai tenaga honorer.

2. Pegawai Berdasarkan Golongan:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	1	1	2



2	GOLONGAN III	5	3	8
3	GOLONGAN II	8		8
4	GOLONGAN I			0
5	HONORER	16	3	19
	JUMLAH	30	7	37

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan golongan didukung oleh 37 orang dengan rincian 2 orang termasuk Golongan IV, 8 orang termasuk Golongan III, 8 orang termasuk Golongan II dan 19 orang termasuk honorer. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua golongan yang mendominasi dalam Sumber Daya Manusia Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yaitu Golongan III dan golongan II masing-masing sejumlah 8 orang dan 8 orang.

3. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1	PASCA SARJANA	2	1	3
2	SARJANA	3	6	9
3	DIPLOMA	2	2	4
4	SLTA	20	2	22
5	SLTP	1		1
6	SD			
	JUMLAH	28	11	39



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pendidikan didukung oleh 39 orang dengan rincian 3 orang lulusan Pasca Sarjana, 9 orang lulusan Sarjana, 4 orang lulusan Diploma, 22 orang lulusan SLTA dan 1 orang lulusan SMP. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo di dominasi oleh lulusan SLTA sejumlah 22 orang. Dengan mengacu pada kondisi dan daya dukung SDM tersebut diatas, Kecamatan Gedangan dapat secara maksimal memberikan pelayanan secara efektif dengan terus meningkatkan pola-pola update dan upgrade kemampuan kompetensi seiring dengan perkembangan era digitalisasi pelayanan yang akan mempermudah masyarakat pada umumnya. Kebutuhan akan peningkatan kompetensi berbasis IT / Digital telah direncanakan dalam program pengembangan SDM Kecamatan Gedangan seiring perkembangan teknologi dan Informasi.

Kondisi sarana prasarana yang ada di Kecamatan Gedangan sudah cukup memadai untuk mendukung operasional pelayanan dan menunjang tujuan kecamatan Gedangandalam memberikan pelayanan prima kepada warga. Proses peningkatan dan upgrade Infrastruktur terutama pelayanan berbasis Digital masih perlu dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada perencanaan anggaran setiap tahun. Diharapkan dengan kondisi yang ada dan perencanaan pengembangan infrastruktur dan layanan berbasis digital dapat memberikan peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.



Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN JENIS BARANG	SATUAN	KETERANGAN
1.	Mobil Station Wagon	4 unit	Baik
2.	Kendaraan roda 2	13 unit	Baik
3.	Lemari/Rak	28 unit	Baik
4.	Filling cabinet / brankas	16 unit	Baik
5.	CCTV	1Paket	Baik
6.	Alat Penghancur Kertas	1 buah	Baik
7.	Mesin Absensi	2 buah	Baik
8.	LCD Proyektor dan monitor	6 buah	Baik
9.	Mesin antrian	1 buah	Baik
10.	Papan Instansi dan pegumuman	11 buah	Baik
11.	Printer	24 buah	Baik
12.	Scanner	3 buah	Baik
13.	Meja Kerja	31 buah	Baik
14.	Kursi/bangku/sofa	100 buah	Baik
15.	AC/Kipas Angin	38 buah	Baik
16.	Televisi	4 buah	Baik
17.	Alat Pemadam/Portable	3 buah	Baik
18.	Personal komputer	15 buah	Baik
19.	laptop	14 set	Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Gedangan dilakukan oleh petugas atau aparatur kecamatan sesuai dengan Standar Pelayanan yaitu



dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai pemohon. Dalam mengukur kinerja, pada tahun 2020 Kecamatan memiliki 10 sasaran, yaitu:

1. Prosentase Penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sesuai Standar Pelayanan
2. Prosentase Penerbitan KK (Kartu Keluarga) yang sesuai Standar Pelayanan
3. Prosentase Penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan
4. Prosentase Penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan
5. Prosentase Penerbitan IMB rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 400 m² yang sesuai Standar Pelayanan
6. Prosentase Penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan
7. Prosentase jumlah koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditindaklanjuti
8. Prosentase desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu
9. Prosentase desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu
10. Prosentase desa yang melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu.

Berdasarkan sasaran kinerja di atas, Kecamatan Gedangan mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Gedangan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020. Berikut adalah tabel tentang hasil analisis pencapaian kinerja layanan Kecamatan Gedangan dan tabel hasil analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Gedangan tahun 2016-2020:



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Tabel 2.6
Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Gedangan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD***)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	102	101	100
2	Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan	82	86	88	89	90	80	84	88	90	90	97	98	100	101	100
3	Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan	80	85	86	89	90	80	84	88	90	90	100	98	102	101	100
4	Persentase penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	102	101	100
5	Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	102	101	100



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

	non perum di bawah 20 m ² yang sesuai Standar Pelayanan															
6	Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	101	101	102
7	Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti	1296	1296	1330	1330	1330	1296	1296	1330	1340	1340	100	100	101	101	101
8	Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu	100	100	100	100	100	93	100	100	100	100	93	100	100	100	100
10	Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Berdasarkan review pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun 2016 hingga 2020 dapat diketahui bahwa kinerja Kecamatan Gedangan sudah memenuhi target dimana realisasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Pada rasio kinerja dapat kita ketahui bahwa kinerja Kecamatan Gedangan sudah baik dan stabil setiap tahunnya. Bila dilihat setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penerbitan KTP Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

2. Persentase Penerbitan KK Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Persentase Penerbitan Surat Keterangan Waris Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

4. Persentase Penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam persentase penerbitan surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar



Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

5. Persentase Penerbitan Imb (Izin Mendirikan Bangunan) Rumah Tinggal Non Tingkat Non Perum Dibawah 200 M² Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 400 m² yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 20 m² yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengendalian pelayanan yang efektif.

6. Persentase Penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Penerbitan legalitas dokumen ini menjadi sangat krusial dikarenakan saat pandemic / kondisi ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan bantuan social dengan syarat kelengkapan dokumen. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

7. Presentase Koordinasi Dan Fasilitasi Di Bidang Pembangunan Dan Pemerintahan Yang Ditidaklanjuti

Pada Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti sudah memenuhi target yang telah



ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

8. Persentase Desa Yang Sudah Menyusun APBDes Tepat Waktu

Pada Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

9. Persentase Desa Yang Sudah Menyusun LPPD Tepat Waktu

Pada Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

10. Persentase Desa Yang Sudah Melaksanakan Musrenbang Desa Tepat Waktu

Pada Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

11. Persentase Penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha) sesuai dengan Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan SIUP/TDP pada Wilayah Kecamatan Gedangan sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan SIUP/TDP yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan yang dapat mendukung kegiatan pemerintah daerah dalam mensupport performance UKM dalam menghadapi pandemic Covid-19. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga



mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 kinerja pelayanan yang sedikit menurun dikarenakan perubahan kebijakan mengacu pada pengendalian protocol kesehatan (Prokes) dan meminimalkan tatap muka dalam pelayanan.

Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

1. Penerbitan KTP , KK , Surat Pindah, Surat Keterangan Waris, Surat Perubahan Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Pencari Kerja, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 200 M2 dan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang belum sesuai Standar Pelayanan;
2. Kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
3. Kurangnya komitmen Aparatur Sipil Negara dalam mematuhi Standar Pelayanan;
4. Standar Pelayanan masih belum diimplementasikan secara optimal,
5. Adanya kekurangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya Aparatur Sipil Negara yang pensiun dan mutasi;
6. Kurangnya koordinasi internal;
7. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
8. Adanya pandemi Covid-19 yang membuat beberapa aktifitas pelayanan menjadi terhambat;
9. Pelayanan yang dilakukan secara online sering mengalami kendala;
10. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan IT dalam penyelesaian permasalahan pelayanan secara online;



11. Kurangnya informasi dan kemampuan masyarakat dalam penggunaan pelayanan secara online;
12. Masih adanya Desa yang belum masuk dalam kategori desa maju.

Upaya yang telah dilakukan :

1. Meningkatkan Kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Standar Pelayanan;
2. Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan dalam bidang Kependudukan kepada Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa;
3. Meningkatkan komitmen Aparatur Sipil Negara dalam mematuhi Standar Pelayanan;
4. Mengoptimalkan kepatuhan Standar Pelayanan;
5. Menambah tenaga Aparatur Sipil Negara yang menangani Pelayanan;
6. Meningkatkan koordinasi internal;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
8. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan secara on line di masa pandemi Covid-19;
9. Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian kendala jaringan online.
10. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga IT di ruang pelayanan;
11. Meningkatkan Pelayanan Prima di Kantor Kecamatan Gedangan dan meningkatkan sosialisasi dalam pelayanan kepada masyarakat;
12. Meningkatkan koordinasi dengan penuh tanggungjawab untuk mendorong terbentuknya desa-desa maju di wilayah Kecamatan Gedangan.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang dijabarkan melalui Renstra



Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah / Perangkat Daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Gedangan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari Renja SKPD terbit DPA Perangkat Daerah yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama period tahun 2016 hingga tahun 2021. Keuangan Kecamatan Gedangan merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Gedangan. Selanjutnya belanja Kecamatan Gedangan sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu pengaturan mengenai



Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Belanja daerah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Adapun perkembangan anggaran dan realisasi Kecamatan Gedangan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo

Uraian Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Kesekretariatan																	
Penyediaan barang/jasa perkantoran	0	0	566,880,000	581,889,290.00	642,493,238	0	0	566,880,000	518,971,922.00	560,661,939.00	99.00	100.00	100.00	89.19	87.26	10%	95%
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	0	0	98,220,000.00	101,950,000.00	127,361,303.00	0	0	98,220,000.00	101,247,168.00	97,620,000.00	99.00	98.80	100.00	99.31	76.65	8%	85%
Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	0	0	1,901,000.00	2,067,950.00	2,825,000.00	0	0	1,889,000.00	2,067,950.00	1,615,400.00	98.80	100.00	95.00	100.00	57.18	8.5%	80.5%
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	0	0	267,350,000.00	275,784,442.50	503,076,600.00	0	0	223,980,000.00	267,276,906.00	481,431,603.00	100.00	98.80	100.00	96.92	95.70	10%	98%
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	0	0	275,450,000.00	289,758,000.00	300,906,000.00	0	0	275,450,000.00	288,321,555.00	279,404,975.00	100.00	100.00	100.00	99.50	92.85	10%	98%
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	0	0	25,340,000.00	35,870,000.00	2,673,600.00	0	0	20,450,000.00	28,507,510.00	1,409,000.00	87.50	85.55	89.19	79.47	52.70	10%	65%
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	0	0	2,455,000.00	2,670,000.00	3,729,600.00	0	0	2,220,000.00	2,670,000.00	791,200.00	88.75	88.00	89.50	100.00	21.21	10%	56%
Penyusunan laporan keuangan	0	0	2,000,000.00	5,000,000.00	2,970,000.00	0	0	2,678,000.00	4,750,000.00	582,000.00	88.00	89.50	93.55	95.00	19.60	10%	45%
Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan																	
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	0	0	4,230,000.00	3,750,000.00	5,190,000.00	0	0	4,230,000.00	3,750,000.00	5,190,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	8%	100%
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	0	0	18,350,000.00	27,213,000.00	2,325,000.00	0	0	18,350,000.00	27,150,000.00	2,075,000.00	-	100.00	100.00	99.77	89.25	12%	95%
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	1,500,000.00	3,000,000.00	2,550,000.00	0	0	1,500,000.00	3,000,000.00	2,550,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25%	100%
Koordinasi dan Kerjasama dengan	0	0	4,905,000.00	937,500.00	15,225,000.00	0	0	4,905,000.00	937,500.00	14,925,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.03	10%	99%



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pembangunan dan Lingkungan																	
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan	0	0	250,000.00	15,000,000.00	3,150,000.00	0	0	250,000.00	15,000,000.00	3,075,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.62	10%	95%
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Perekonomian	0	0	250,000.00	3,000,000.00	2,700,000.00	0	0	250,000.00	3,000,000.00	2,550,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.44	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	0	0	250,000.00	260,000.00	255,000.00	0	0	250,000.00	260,000.00	240,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.12	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	250,000.00	260,000.00	255,000.00	0	0	250,000.00	260,000.00	240,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.12	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	0	0	250,000.00	260,000.00	255,000.00	0	0	250,000.00	260,000.00	240,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.12	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan	0	0	6,050,000.00	8,500,000.00	255,000.00	0	0	6,050,000.00	8,456,690.00	240,000.00	99.05	99.00	95.00	99.49	94.12	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian	0	0	344,250,000	434,100.00	434,100.00	0	0	344,250,000	434,100.00	419,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.54	10%	98%
Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	0	0	50,000,000.00	88,111,780.00	8,793,224.00	0	0	50,000,000.00	88,019,380.00	5,927,000.00	100.00	100.00	100.00	99.90	67.40	10%	98%
Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan IMB Usaha Mikro dan IMB Rumah Tinggal	0	0	11,110,000.00	24,464,400.00	5,295,000.00	0	0	11,110,000.00	24,443,400.00	5,295,000.00	100.00	100.00	100.00	99.91	100.00	10%	98%
Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan SIUP, TDP Usaha Mikro	0	0	2,225,000.00	2,622,000.00	2,780,000.00	0	0	2,225,000.00	2,622,000.00	2,580,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.81	10%	98%
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perbup, Pengawasan dan Penertiban Usaha, Penanganan Konflik Sosial	0	0	252,540,000.00	307,062,500.00	267,704,000.00	0	0	252,540,000.00	294,375,775.00	263,366,480.00	99.05	99.00	95.00	99.49	94.12	10%	98%
Pembinaan Lembaga, Kegiatan	0	0	4,234,500.00	8,196,000.00	149,955,200.00	0	0	4,234,500.00	8,175,000.00	147,361,184.00	95.00	99.49	94.12	95.87	98.27	10%	98%



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Lingkungan Hidup dan Penanganan Sampah Domestik																	
Pembinaan Perangkat Desa	0	0	8,678,900.00	12,067,000.00	20,620,000.00	0	0	8,678,900.00	12,025,000.00	19,595,000.00	99.74	95.03	99.74	99.74	95.03	10%	98%
Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima	0	0	45,098,000.00	88,267,500.00	27,625,000.00	0	0	45,098,000.00	84,812,500.00	25,975,000.00	99.74	95.03	99.74	99.65	94.03	10%	98%
Pembinaan Lembaga dan Kegiatan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	0	0	3,123,000.00	3,750,000.00	111,154,900.00	0	0	3,000,050.00	3,750,000.00	87,460,715.00	95.00	99.49	95.00	96.09	78.68	10%	98%
Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum																	
Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum	0	0	97,185,000.00	41,075,300.00	41,075,300.00	0	0	92,137,250.00	41,075,300.00	38,804,000.00	95.03	99.74	94.83	100.00	94.47	15%	95%
Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum	0	0	34,945,000.00	0.00	0.00	0	0	31,292,250.00	0.00	0.00			89.55		-		



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun ketiga. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun ketiga yang tercakup dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.

Berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini serta memperhatikan hasil pencapaian pelayanan, analisa RTRW Kecamatan Gedangan dan KLHS Kecamatan Gedangan, maka tantangan dan peluang Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Matrik Tantangan dan Peluang

Tantangan	<ol style="list-style-type: none">1. Tuntutan terselenggaranya koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan2. Tuntutan perkembangan pembangunan yang harus berwawasan lingkungan hidup3. Belum terib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat desa4. Belum disiplinnya pelaksanaan penyusunan APBDDes, LPPD, dan MusrenbangDes5. Pemahaman aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan dokumen dan proses pembangunan desa yang masih kurang6. Pelaksanaan protokol kesehatan belum optimal untuk mengurangi penyebaran Covid 19
Peluang	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya otonomi daerah yang memberikan otonomi seluas-luasnya2. Adanya perwujudan e-government3. Diwujudkannya pelayanan yang mudah dalam aplikasi Online4. Peningkatan Kompetensi SDM Kecamatan seiring dengan tuntutan media informasi pelayanan5. Perbaikan Sistem Informasi Manajemen terkait Standar Pelayanan secara Dokumentasi Online / Offline



Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang dijabarkan melalui Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Gedangan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari Renja Perangkat Daerah terbit DPA Perangkat Daerah yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama period tahun 2016 hingga tahun 2021. Keuangan Kecamatan Gedangan merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Gedangan. Selanjutnya belanja Kecamatan Gedangan sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.



2.5 TELAAH RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH (RTRW)

Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi program kerja pelayanan Pelayanan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Telaah Renstra RTRW

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah
1	SSWP I meliputi wilayah Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sedati, dengan fungsi utama Permukiman, Industri dan Perdagangan skala lokal, regional, dan internasional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Waru;	Zona industri Kecamatan Gedangan seluas 534,36 Ha	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman	1. Perijinan pembangunan industri 2. Perijinan pembangunan rumah pada kawasan pemukiman pedesaan 3. Perijinan pembangunan rumah pada kawasan pemukiman pedesaan 4. Koordinasi dalam pengembangan wilayah kecamatan 5. Adanya Pengawasan pemanfaatan lahan dan alih fungsi lahan
2	Sistem Perkotaan: Hirarki perkotaan sedang dengan fungsi sebagai pemasok 2 kebutuhan dan lokasi pengolahan agroindustri dan berbagai kegiatan agrobisnis	Kawasan permukiman perdesaan Kecamatan Gedangan, seluas 12,77 Ha	ketertiban umum	
3	Kawasan yang mempunyai prospek pengembangan tinggi dan mendapatkan prioritas pelayanan air bersih	Kawasan permukiman perkotaan Kecamatan Gedangan, seluas 1.511,72 Ha		
4	Kawasan militer berada pada sebagian Kecamatan Waru, Gedangan, Buduran, dan Sedati. Kawasan militer tidak diijinkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan lain			



2.6 TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Pada Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sidoarjo, pada Kecamatan Gedangan terdapat beberapa isu pembangunan berkelanjutan yang terdapat di Kecamatan Gedangan, antara lain:

1. Wilayah kumuh akibat kepadatan dan pertumbuhan penduduk
2. Alih fungsi lahan sawah dan tambak menjadi pemukiman serta industry sehingga dapat menambah aspek kendali lingkungan yang lebih kompleks
3. Kemacetan lalu lintas akibat jumlah kendaraan yang meningkat tanpa pelebaran jalan



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDANGAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Keberadaan Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 UU No. 32 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo maka tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Gedangan berfokus pada urusan pemerintahan yaitu pelayanan terhadap masyarakat. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedangan melakukan Evaluasi dan analisis kinerja. Setelah Kecamatan Gedangan melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2021 - 2026.

Identifikasi permasalahan di Kantor Kecamatan Gedangan dilakukan terhadap beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan yang terfokus pada pelayanan kepada masyarakat. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Gedangan serta dikolaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Kecamatan Gedangan. Permasalahan pelayanan adalah perbedaan / kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja Kecamatan Gedangan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo seperti halnya instansi lainnya juga memiliki permasalahan-permasalahan yang diharapkan ataupun tidak



tetap harus dihadapi. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

No	Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan	100	1. Kualitas dan Kuantitas Sumber daya aparatur 3. Sarana dan prasarana 4. SOP pelayanan 5. Perencanaan dan pelaporan kinerja kecamatan 6. Sinergitas antar bidang 7. Administrasi perkantoran	1. Pemahaman masyarakat tentang syarat pelayanan umum 2. Administratif tingkat desa 3. Kedisiplinan penyusunan dokumen desa 4. Kualitas sumberdaya aparatur desa	1. Kurangnya jumlah SDM ruang pelayanan yang memiliki jiwa pelayanan prima 2. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan 3. Ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait persyaratan dalam pelayanan umum 5. Perencanaan dan pelaporan kinerja kecamatan masih belum optimal 6. Belum sinerginya hubungan antar pengelola keuangan daerah 7. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat kecamatan 8. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat Desa 9. Belum disiplinnya pelaksanaan penyusunan APBDes, LPPD, dan MusrenbangDes 10. Pemahaman aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan dokumen dan proses pembangunan desa yang masih kurang
2	Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan	100			
3	Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan	100			
4	Persentase penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan	100			
5	Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 20 m ² yang sesuai Standar Pelayanan	100			
6	Persentase penerbitan SIUP/TDP pada Wilayah Kecamatan Gedangan yang sesuai Standar Pelayanan	100			
7	Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan	100			
8	Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti	12330			
9	Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu	100			



Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Program Kecamatan Gedangan disusun melalui Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yang dijabarkan melalui Renstra Organisasi Pemerintah Daerah Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan Organisasi Pemerintah Daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam realisasi penerapan program di Kecamatan Gedangan diidentifikasi dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kompetensi dan Jumlah SDM	Kurangnya jumlah SDM ruang pelayanan yang memiliki jiwa pelayanan prima	1. Kebijakan pemerintah daerah dan manajemen ASN yang kompleks 2. Belum optimalnya pemanfaatan data dan sistem informasi serta belum dipahami dan dilaksanakannya penyusunan kebutuhan SDM secara tepat.
		Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat	1. Belum optimalnya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam pelayanan



		kecamatan	terpadu perizinan dan non perizinan di Kecamatan sesuai kewenangan yang sudah dilimpahkan 2. Masih rendahnya inovasi yang dibuat oleh Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring terkait ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana. 4. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan 5. Masih belum optimalnya pemanfaatan dana Kelurahan.
		Belum optimalnya penerapan standar pelayanan	
2.	Hubungan antar lembaga	Belum tertib dan lemahnya pemahaman administrasi perkantoran tingkat Desa	6. Masih rendahnya pemahaman pwerangkat Desa mengenai akuntabilitas laporan dan administrasi Desa 7. Belum maksimalnya sosialisasi informasi pelayanan di era Digital kepada Masyarakat 8. Belum optimalnya penggunaan perangkat dan infrastruktur di Desa dalam penyajian informasi & pelayanan kepada Masyarakat
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait persyaratan dalam pelayanan umum	

Dari identifikasi dan pemetaan permasalahan tersebut di atas, Kecamatan Gedangan membuat Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renja sesuai dengan aspek permasalahan dan telaah akar masalah. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan. Dari Renja Organisasi Pemerintah Daerah terbit DPA Organisasi Pemerintah Daerah yang saling berkaitan satu sama lainnya.

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan tahun 2016-2021, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang



dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2021-2026. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**.

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalkan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi di *breakdown* ke dalam tiap misi.

Guna mewujudkan visi Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan diantaranya adalah Kecamatan Gedangan. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 memberikan pedoman bagi Kecamatan Gedangan dalam menyusun Renstra Kecamatan Gedangan. Berdasarkan visi misi dan isu strategis yang ada maka ditetapkan Tujuan dari masing-masing misi yang diukur dengan indikator. Kelima misi tersebut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan;



4. Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Kebutuhan Dasar Lainnya;
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Dari 5 (lima) misi RPJMD, ada 2 misi yang harus di jadikan acuan oleh kecamatan Gedangan yaitu Misi ke-1 dan Misi ke-5. Ini menjadi pendorong untuk Kecamatan Gedangan untuk pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Visi : <i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</i>			
Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha 2. Mewujudkan Masyarakat Religius Yang Berpegang Teguh Pada Nilai-nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan yang belum sesuai Standar Pelayanan; - Kurangnya pemahaman mengenai Standar Pelayanan; - Kurangnya komitmen dalam mematuhi Standar Pelayanan; - Standar Pelayanan masih belum diimplementasikan secara optimal; - Adanya kekurangan Sumber Daya Manusia; - Kurangnya sarana dan prasarana; - Adanya pandemi Covid-19 membuat aktifitas pelayanan terhambat; - Pelayanan secara online sering mengalami kendala; - Kurangnya kemampuan IT pelayanan secara online; - Kurangnya informasi masyarakat dalam pelayanan online. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya keahlian SDM yang menguasai sarpras yang ada; 2. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarpras yang memadai; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Peraturan Bupati tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan; 2. Tersedianya dukungan APBD.
	<ul style="list-style-type: none"> - Masih lemahnya inventarisir informasi terdokumentasi terkait permasalahan ketertiban umum di wilayah kecamatan - Kurangnya keterbukaan informasi yang didapat oleh Perangkat Daerah terutama permasalahan ketertiban umum secara tepat dan cepat 	Masih kurangnya kesadaran mengenai pentingnya keterbukaan informasi penghambat ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan pemerintah pusat mengenai pengukuran dan pencapaian tujuan pelayanan ketertiban umum 2. Adanya dukungan kekeluargaan antar instansi pemerintah dan stakeholder yang sangat baik.

Pada Misi satu, dijabarkan ke dalam faktor penghambat dan faktor pendorong. Fokus pada misi ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan



yang baik guna menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yang menjadi prasyarat dasar bagi percepatan pembangunan di kabupaten Sidoarjo. Penjabaran faktor penghambat dan faktor pendorong pada Misi tersebut secara substansial memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di level pemerintah daerah maupun Kecamatan Gedangan.

Kecamatan Gedangan memiliki beberapa penghambat / permasalahan untuk bisa mencapai Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD. Disamping itu, Kecamatan Gedangan juga memiliki faktor pendorong untuk mengatasi penghambat / permasalahan yang di hadapi. Dengan adanya faktor pendorong yang mampu mengatasi faktor penghambat maka diharapkan Kecamatan Gedangan mampu untuk mewujudkan misi tersebut.

3.3 TELAAH RENSTRA KABUPATEN SIDOARJO

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni “*Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani*”. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tahapan-tahapan program dan kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan selama periode tersebut. Dokumen perencanaan ini disusun melalui proses yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo menyusun RPJMD, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan RPJMD, musyawarah perencanaan pembangunan, perumusan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan RPJMD sebagai sebuah Peraturan Daerah. Proses penyusunan RPJMD tersebut melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo perlu dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan yang lebih terinci untuk memudahkan pelaksanaannya. Setiap tahunnya RPJMD perlu dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tiap tahunnya.

RKPD memuat rencana program dan kegiatan pembangunan, pendanaan dan kinerja pembangunan tiap tahun untuk seluruh urusan pemerintahan daerah. Selain itu RPJMD dijabarkan ke dalam rencana strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan periode 2021-2026 di urusan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan tiap urusan di setiap tahunnya, dibuat dokumen rencana kerja (Renja) Organisasi Pemerintah Daerah yang mengacu pada program dan kegiatan di Renstra Organisasi Pemerintah Daerah dan menjabarkan Organisasi Pemerintah Daerah di tahun yang bersesuaian.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan benang merah dari Startegi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang



bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat / terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arahan ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).
- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah



dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Program Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD merupakan instrumen penting dan strategis dalam mewujudkan target pembangunan daerah. Program pembangunan tersebut merupakan acuan bagi seluruh Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun serangkaian kegiatan yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun kedua. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedua yang tercakup dalam RPJMD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Jawa Timur dan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Pasuruan dan Mojokerto. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam arahan sistim perkotaan Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Beberapa rencana tata ruang yang menjadi pertimbangan antara lain:

- a. Pengembangan Kasawan Agropolitas di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang dan Bangkalan;
- b. Pengembangan kawasan industri dan perdagangan di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.



Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Gedangan yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS yaitu menunjukkan bahwa Kecamatan Gedangan merupakan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo dalam hierarki atau besaran perkotaan termasuk perkotaan sedang. Secara perwilayahan Kecamatan Gedangan termasuk ke dalam SSWP 1 yaitu dengan pusat di Kawasan Waru dan fungsi utama permukiman, industri dan perdagangan, dikembangkan fasilitas transportasi, mall, bandar udara dan fasilitas pendukung lainnya untuk skala lokal, regional, dan internasional. Kecamatan Gedangan masuk pada rencana pengembangan wilayah prioritas yang meniadakan pelayanan air bersih dan sekaligus sebagai jaringan distribusi air bersih serta sebagai ruang untuk utilitas (air bersih). Kondisi saat ini Kecamatan Gedangan memiliki zona industri seluas 534,36 Ha dan kawasan permukiman seluas 12,77 Ha serta kawasan permukiman perkotaan seluas 1,511,72 Ha. Kecamatan Gedangan termasuk juga kawasan Militer yang terdiri dari Kawasan Tangsi Militer, Kawasan Latihan Militer, dan Kawasan Penyimpanan Mesiu/Amunisi

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Dibahas melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan seluruh jajaran Kecamatan Gedangan, Akademisi, dan stake holder terkait.
- b. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel.



- 2) Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut.

Tabel 3.4
Kriteria Pembobotan

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta

Berdasarkan pada penelaahan identifikasi masalah, visi misi kepala daerah dan RTRW, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Kecamatan Gedangan antara lain:

a. Kekuatan

1. Adanya pendanaan yang konsisten dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
2. Keberadaan kecamatan semakin kuat seiring dengan diterbitkannya regulasi baru Perbup Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 mengenai tupoksi kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
3. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati ke Kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

b. Kelemahan

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum optimal
2. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan



3. Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam administrasi barang
 4. Ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal
 5. Perencanaan & Pelaporan kinerja kecamatan masih belum optimal
 6. Belum sinerginya hubungan antar pengelola keuangan daerah
 7. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat kecamatan
 8. Kualitas perfoma nilai SKM Kecamatan
 9. Berapa Desa menuju Mandiri
 10. Proses penyusunan dokumen perencanaan, laporan, penyusunan APBDes
- c. Peluang
1. Adanya otonomi daerah yang memberikan otonomi seluas-luasnya
 2. Adanya pewujudan *e-government*
- d. Ancaman
1. Tuntutan terselenggaranya koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan
 2. Tuntutan perkembangan pembangunan yang harus berwawasan lingkungan hidup
 3. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat Desa
 4. Belum disiplinnya pelaksanaan penyusunan APBDes, LPPD dan MusrenbangDes
 5. Pemahaman aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan dokumen dan proses pembangunan desa yang masih kurang
 6. Belum berakhirnya masa pandemi dan kurang disiplin penerapan protokol kesehatan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inofatif. Adapun Visi yang mengacu pada Visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah :

”Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”.

Sedangkan Misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kabupaten Sidoarjo dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas sehingga tujuan Organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, maka Misi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;

MISI 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;

MISI 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan;

MISI 4: Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Kebutuhan Dasar Lainnya;

MISI 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga



Dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan, penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan Publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung terselenggaranya Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD yaitu *“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha”*, Kecamatan Gedangan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Gedangan yaitu *“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum”*.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN**

**Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangan**

Tujuan	Indikator Tujuan	TARGET KINERJA TUJUAN						Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN					
		PADA TAHUN								PADA TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.1 (Sangat Baik)	89.1 (Sangat Baik)	89.2 (Sangat Baik)	89.3 (Sangat Baik)	89.4 (Sangat Baik)	89.5 (Sangat Baik)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	N/A	89.1 (Sangat Baik)	89.1 (Sangat Baik)	89.2 (Sangat Baik)	89.3 (Sangat Baik)	89.4 (Sangat Baik)
		Nilai SAKIP	76 (BB)	80 (A)	80.1 (A)	80.2 (A)	80.3 (A)		80.4 (A)						
		Nilai RB	N/A	27.22	28	29	30		31						
		Nilai IPP	N/A	4.51 (A)	4.55 (A)	4.60 (A)	4.65 (A)		4.65 (A)						
		Persentase Serapan Anggaran	N/A	90%	90.25%	90.50%	90.75%		91%						
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

Untuk mendukung terselenggaranya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD yaitu “*Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital*” dan “*Terselenggaranya*”



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha” maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Gedangan yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.

Kecamatan Gedangan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN GEDANGAN

Strategi Pembangunan Renstra Kecamatan Gedangan tahun 2021-2026 sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan.

Strategi pembangunan adalah cara/pendekatan/kebijakan/tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, rumusan strategi pembangunan selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan Arah Kebijakan pembangunan tahunan selama lima tahun periode Renstra. Dengan demikian, agar dapat dihasilkan Arah Kebijakan Pembangunan tahunan tersebut, perlu disusun Strategi, yang menggambarkan mengenai cara / pendekatan / kebijakan / tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Gedangan.

Untuk peningkatan kinerja Kecamatan secara umum dan guna mewujudkan visi dan misinya serta mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan Strategi sebagai berikut :

- a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal;
- b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan;
- e. Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan;
- f. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan;



- g. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai;
- h. Meningkatkan partisipatif masyarakat.

Strategi Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 di atas, menjadi pijakan utama dalam penetapan dan pelaksanaan Arah Kebijakan guna setiap misi Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026. Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Gedangan selama periode Tahun 2016 - 2021 yang tertuang pada Matrik Renstra 2016 - 2021 pada lampiran 1.

Kebijakan Kecamatan Gedangan untuk 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
2. Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif;
3. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/kelurahan serta masyarakat;
4. Mengembangkan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangan
Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan				
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha				
MISI 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	a.Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal; b.Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan; c.Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan; d.Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan; e.Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan; f.Memberikan sarana dan prasarana yang memadai; g.Meningkatkan partisipatif masyarakat	1.Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 2.Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif 3.Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/ kelurahan serta masyarakat	1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan	Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Penjelasan urutan dari Visi, Misi, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Program masing-masing bagian terkait di Kecamatan Gedangan dijelaskan dalam tata urutan dan korelasi pada Matrik Renstra Kecamatan Gedangan yang terlampir pada Lampiran.1

5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GEDANGAN

Program dan kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gedangan pada Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja organisasi akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai. Untuk itu tentunya diperlukan suatu program dan kegiatan yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Program dan



Kegiatan Kecamatan Gedangan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran serta memberikan sumbangan bagi pencapaian misi Kecamatan Gedangan. Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kantor Kecamatan Gedangan ini merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Kantor Kecamatan Gedangan dalam merealisasikan program kerja operasionalnya. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gedangan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan program terkait Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan serta melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.



4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan melaksanakan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya RPJMD 2021-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka langkah operasional dan pengendalian di Kecamatan Gedangan telah dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi Perangkat Daerah. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi bagian dan seksi di Kecamatan Gedangan dalam tugas pokoknya, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun rencana program dan kegiatan didalam renstra dapat dilihat di dalam table Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo

Muti Bupati	Tujuan PD	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / kegiatan (Intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	18	19	20	21		22		23		24		25		26	26							
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, ketertarikan dan keterlibatan umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	a. 100% b. 80% c. 100%	a. 100% b. 80% c. 100%	1.951.043.903	a. 100% b. 80% c. 100%	1.553.003.419	a. 100% b. 85% c. 100%	1.708.303.761	a. 100% b. 90% c. 100%	1.879.134.137	a. 100% b. 90% c. 100%	2.087.047.550	a. 100% b. 95% c. 100%	2.273.752.308	a. 100% b. 95% c. 100%	2.501.127.536	Kecamatan Gedangan	Camat			
			b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar																				
			c. Persentase desa yang mendapat pembinaan lintas lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL																				
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	9600 Berkas	9600 Berkas	39.427.700	9600 Berkas	254.967.628	9600 Berkas	280.464.391	9800 Berkas	308.510.830	10000 Berkas	339.361.913	12000 Berkas	373.298.104	12000 Berkas	410.627.915	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Jumlah pelayanan umum yang diterima b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	a. 9000 Berkas b. 80 Orang	a. 9000 Berkas b. 80 Orang	39.427.700	a. 9000 Berkas b. 80 Orang	254.967.628	a. 9000 Berkas b. 100 Orang	0	a. 9800 Berkas b. 100 Orang	0	a. 10000 Berkas b. 100 Orang	0	a. 12000 Berkas b. 100 Orang	0	a. 12000 Berkas b. 100 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A			1 Laporan	280.464.391	1 Laporan	308.510.830	1 Laporan	339.361.913	1 Laporan	373.298.104	1 Laporan	410.627.915	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian				
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	215.088.100	8 Laporan	267.733.603	8 Laporan	294.506.963	8 Laporan	323.957.859	8 Laporan	356.353.425	8 Laporan	391.988.768	8 Laporan	431.187.645	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesos d. Kasi Pembangunan		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan d. Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	215.088.100	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	267.733.603	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesos d. Kasi Pembangunan					
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A			4 Laporan	294.506.963	4 Laporan	323.957.859	4 Laporan	356.353.425	4 Laporan	391.988.768	4 Laporan	431.187.645	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesos d. Kasi Pembangunan							



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					21	22	23	24	25	26										
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai lusan maksimal 400m2 yang diterbitkan 2. Jumlah laporan hasil money bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, agama dan pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun 3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.096.528.103	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.030.302.188	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.133.332.407	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.246.665.647	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.371.332.212	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.508.465.434	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.650.311.970	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembangunan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai lusan maksimal 400m2 yang terdaftar	75 berkas	75 berkas	2.903.175	75 berkas	18.626.200	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	NA					1 Dokumen	20.488.820	1 Dokumen	22.537.702	1 Dokumen	24.791.472	1 Dokumen	27.270.619	1 Dokumen	29.997.681	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembangunan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	a. Jumlah money bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan b. Jumlah money bidang pembangunan dan lingkungan c. Jumlah money bidang pemerintahan d. Jumlah money bidang perekonomian	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	1.500.000	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	20.889.540	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesos d. Kasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	NA					4 Laporan	22.758.494	4 Laporan	25.034.343	4 Laporan	27.537.778	4 Laporan	30.291.656	4 Laporan	33.320.711	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesos
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	a. Jumlah kegiatan pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang telah dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan c. Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	1.692.124.928	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	990.986.448	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	a. Kasi perekonomian b. Kasi Pembangunan Fisik
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	NA					2 Laporan	1.090.085.093	2 Laporan	1.199.093.802	2 Laporan	1.319.002.962	2 Laporan	1.450.903.259	2 Laporan	1.595.993.584	Kecamatan Gedangan	Kasi perekonomian
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100.325.368	100%	122.568.203	100%	299.825.023	100%	329.807.525	100%	362.788.278	100%	399.067.106	100%	438.973.816	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.325.368	2 Kegiatan	122.568.203	1 Kegiatan	299.825.023	1 Kegiatan	329.807.525	1 Kegiatan	362.788.278	1 Kegiatan	399.067.106	1 Kegiatan	438.973.816	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Tujuan PO	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan b. Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	100,325,388	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	122,568,203	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	N/A	N/A	100 Orang	134,825,023	100 Orang	148,307,525	100 Orang	163,138,278	100 Orang	179,452,108	100 Orang	197,397,318	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib				
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan FORKOPIMKA yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	1 Dokumen	79,000,000	1 Dokumen	86,900,000	1 Dokumen	95,590,000	1 Dokumen	105,149,000	1 Dokumen	115,663,900	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib				
		Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas pilkada, pilg, pilres	15 Desa	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib		
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	N/A	N/A	3 Lembaga Masyarakat	86,000,000	3 Lembaga Masyarakat	94,600,000	3 Lembaga Masyarakat	104,060,000	3 Lembaga Masyarakat	114,468,000	3 Lembaga Masyarakat	125,912,600	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib				
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	26,613,300	100%	25,479,000	100%	96,026,900	100%	105,629,590	100%	116,192,548	100%	127,811,804	100%	140,592,984	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	15 Desa	15 Desa	26,613,300	15 Desa	25,479,000	15 Desa	96,026,900	15 Desa	105,629,590	15 Desa	116,192,548	15 Desa	127,811,804	15 Desa	140,592,984	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi b. Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi	a. 15 desa b. 15 Desa	a. 15 desa b. 15 Desa	8,810,400	a. 15 desa b. 15 Desa	8,660,000	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan		



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kontrol Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					21	22	23	24	25	26										
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	NA			2 Dokumen	9,526,000	2 Dokumen	10,478,800	2 Dokumen	11,526,460	2 Dokumen	12,879,106	2 Dokumen	13,947,017	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	17,802,900	15 Kegiatan	16,819,000	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	NA			4 Dokumen	18,500,900	4 Dokumen	20,350,990	4 Dokumen	22,386,089	4 Dokumen	24,624,698	4 Dokumen	27,087,168	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan		
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	N/A Dokumen	N/A Dokumen		N/A Dokumen	0	N/A Dokumen	0	N/A Dokumen	0	N/A Dokumen	0	N/A Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	NA			4 Dokumen	68,000,000	4 Dokumen	74,800,000	4 Dokumen	82,280,000	4 Dokumen	90,508,000	4 Dokumen	99,558,800	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	4,908,220,779	100%	15,671,248,007	100%	17,275,372,808	100%	19,002,910,088	100%	20,903,201,098	100%	22,993,521,207	100%	25,292,673,328	Kecamatan Gedangan	Sekretariat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang tindaklanjuti	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	51,273,418	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	174,513,802	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan 2. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	NA			1. 5 Dokumen 2. 8 Dokumen	191,965,182	1. 5 Dokumen 2. 8 Dokumen	211,161,700	1. 5 Dokumen 2. 8 Dokumen	232,277,870	1. 5 Dokumen 2. 8 Dokumen	255,505,657	1. 5 Dokumen 2. 8 Dokumen	281,056,223	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	367,702	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 dokumen	404,472	2 dokumen	444,919	2 dokumen	489,411	2 dokumen	538,352	2 dokumen	592,187	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	280,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	308,000	1 Dokumen	338,800	1 Dokumen	372,680	1 Dokumen	409,948	1 Dokumen	450,943	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	280,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	308,000	1 Dokumen	338,800	1 Dokumen	372,680	1 Dokumen	409,948	1 Dokumen	450,943	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	280,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kendali Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
1	2	18	19	20	21		22		23		24		25		26	27	28			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	308,000	1 Dokumen	338,800	1 Dokumen	372,880	1 Dokumen	409,948	1 Dokumen	450,943	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	280,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	308,000	1 Dokumen	338,800	1 Dokumen	372,880	1 Dokumen	409,948	1 Dokumen	450,943	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	616,785	2 dokumen	525,000	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A				2 Laporan	577,500	2 Laporan	635,250	2 Laporan	698,775	2 Laporan	768,653	2 Laporan	845,518	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	656,833	4 Dokumen	172,501,100	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A				4 Laporan	189,751,210	4 Laporan	208,728,331	4 Laporan	229,598,964	4 Laporan	252,558,861	4 Laporan	277,814,747	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	90%	90%	3,630,528,362	90%	3,908,233,577	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	N/A				90%	4,299,056,935	90%	4,728,982,629	90%	5,201,858,891	90%	5,722,044,780	90%	6,294,249,259	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	25 Orang	25 Orang	3,629,470,967	25 Orang	3,898,628,560	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A				25 Orang/bulan	4,289,591,416	25 Orang/bulan	4,718,550,558	25 Orang/bulan	5,190,405,813	25 Orang/bulan	5,709,448,175	25 Orang/bulan	6,280,390,792	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	1,500,000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A				1 Dokumen	1,650,000	1 Dokumen	1,815,000	1 Dokumen	1,996,500	1 Dokumen	2,196,150	1 Dokumen	2,415,765	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	100 SPM	100 SPM	0	100 SPM	1,230,017	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A				1 Dokumen	1,353,019	1 Dokumen	1,488,321	1 Dokumen	1,637,153	1 Dokumen	1,800,868	1 Dokumen	1,980,955	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan / (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA				1 Laporan	2.750,000	1 Laporan	3.025,000	1 Laporan	3.327,500	1 Laporan	3.660,250	1 Laporan	4.026,275	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Semesteran PD yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	1.057,395	12 Laporan	3.375,000	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan				12 Laporan	3.712,500	12 Laporan	4.083,750	12 Laporan	4.492,125	12 Laporan	4.941,338	12 Laporan	5.435,471	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD PD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD PD yang telah tersertifikasi	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	5.452,005	a. 90% b. 90%	5.366,140	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian			
			1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	a. N/A b. N/A					a. 90% b. 0%	10.870,754	a. 90% b. 0%	11.957,829	a. 90% b. 0%	13.153,612	a. 90% b. 0%	14.468,974	a. 90% b. 0%	15.915,871	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD PD yang disusun tepat waktu	3 Laporan	3 Laporan	5.452,005	3 Laporan	5.366,140	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan					4 Laporan	5.902,754	4 Laporan	6.493,029	4 Laporan	7.142,332	4 Laporan	7.856,566	4 Laporan	8.642,222	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan 2. Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	NA					4 Laporan	4.968,000	4 Laporan	5.464,800	4 Laporan	6.011,280	4 Laporan	6.612,408	4 Laporan	7.273,649	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase alat dan bahan penunjang yang disediakan	90%	90%	305.072,175	90%	1.022.201,007	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	N/A					89,1 Nilai	1.124.421,207	89,1 Nilai	1.238.883,328	89,1 Nilai	1.380.549,660	89,1 Nilai	1.496.604,627	89,1 Nilai	1.646.265,089	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik ipenerangan yang tersedia	124 Buah	124 Buah	4.145,937	124 Buah	18.352,695	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	NA					1 Paket	20.187,965	1 Paket	22.206,762	1 Paket	24.427,438	1 Paket	26.870,181	1 Paket	29.557,200	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	13 buah	13 buah	48.868,809	645 Buah	381.826,258	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA					7 Paket	420.008,884	7 Paket	462.009,772	7 Paket	508.210,750	7 Paket	559.031,825	7 Paket	614.935,007	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	0	5 Jenis	338.205	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Intermediate/output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Peninggajian Jawa	Keterangan	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
1	2	18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A				1 Paket	372,028	1 Paket	409,229	1 Paket	450,151	1 Paket	495,167	1 Paket	544,883	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	1. 8 Orang 2. N/A	1. 8 Orang 2. N/A	132,000,000	1. 8 Orang 2. N/A	173,800,000	1. 8 Orang 2. N/A	0	1. 8 Orang 2. N/A	0	1. 8 Orang 2. N/A	0	1. 8 Orang 2. N/A	0	1. 8 Orang 2. N/A	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A				1 Paket	191,180,000	1 Paket	210,298,000	1 Paket	231,327,800	1 Paket	254,460,580	1 Paket	279,906,838	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	2,352,038	600 Buah	91,627,212	600 Buah	0	600 Buah	0	600 Buah	0	600 Buah	0	600 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A				1 Paket	100,789,933	1 Paket	110,868,926	1 Paket	121,955,819	1 Paket	134,151,401	1 Paket	147,566,541	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3,182,820	3 Jenis	5,124,984	3 Jenis	0	3 Jenis	0	3 Jenis	0	3 Jenis	0	3 Jenis	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	N/A				3 Dokumen	5,637,482	3 Dokumen	6,201,230	3 Dokumen	6,821,353	3 Dokumen	7,503,489	3 Dokumen	8,253,837	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	4 Laporan	4 Laporan	0	4 Laporan	8,905,743	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A				Paket	9,796,317	Paket	10,775,949	Paket	11,853,544	Paket	13,038,898	Paket	14,342,788	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jaman rapat/tamu yang disediakan b. Prosentase kunjungan tamu yang difasilitasi	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	39,092,960	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	92,226,000	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A				4 Laporan	101,448,600	4 Laporan	111,593,460	4 Laporan	122,752,806	4 Laporan	135,028,087	4 Laporan	148,530,865	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	100%	75,399,811	100%	250,000,000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A				2 Laporan	275,000,000	2 Laporan	302,500,000	2 Laporan	332,750,000	2 Laporan	366,025,000	2 Laporan	402,827,500	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penujng Uraan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	65 Buah	65 Buah	0	65 Buah	8,283,955,791	65 Buah	0	65 Buah	0	65 Buah	0	65 Buah	0	65 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah BMD yang diadakan	N/A				108 Jenis	9,039,383,370	108 Jenis	9,943,321,706	108 Jenis	10,937,853,878	108 Jenis	12,031,419,265	108 Jenis	13,234,561,102	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	N/A Unit	N/A Unit	0	1 Unit	96,000,000	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A				1 Unit	105,600,000	1 Unit	116,160,000	1 Unit	127,776,000	1 Unit	140,553,600	1 Unit	154,808,960	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	N/A Unit	N/A Unit	0	2 Unit	96,000,000	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Mda/Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A			2 Unit	105,800,000	2 Unit	116,160,000	2 Unit	127,776,000	2 Unit	140,553,600	2 Unit	154,808,900	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	N/A Unit	N/A Unit	0	N/A Unit	50,000,000	N/A Unit	0	N/A Unit	0	N/A Unit	0	N/A Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	N/A			1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	1 Unit	73,205,000	1 Unit	80,525,500	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	23 Buah	23 Buah	0	100 Buah	706,802,705	23 Buah	0	23 Buah	0	23 Buah	0	23 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A			107 Unit	777,282,976	107 Unit	854,989,274	107 Unit	940,488,201	107 Unit	1,034,537,021	107 Unit	1,137,990,723	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	70 Buah	70 Buah	0	10 Buah	705,353,086	70 Buah	0	70 Buah	0	70 Buah	0	70 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A			59 Unit	775,888,395	59 Unit	853,477,235	59 Unit	938,824,958	59 Unit	1,032,707,454	59 Unit	1,135,978,199	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Gedung	1 Gedung	0	1 Gedung	6,830,000,000	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A			1 Unit	7,220,031,999	1 Unit	7,942,035,198	1 Unit	8,736,238,719	1 Unit	9,609,862,590	1 Unit	10,570,848,850	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	90%	90%	812,790,200	90%	1,349,977,600	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
			Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	N/A					90%	1,484,975,360	90%	1,633,472,896	90%	1,796,820,186	90%	1,976,502,204	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1700 Surat	1700 Surat	0	1700 Surat	1,500,000	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A					1 Laporan	1,850,000	1 Laporan	1,815,000	1 Laporan	1,996,500	1 Laporan	2,196,150	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	12 bulan	119,800,000	12 bulan	294,000,000	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik yang Disediakan	N/A					12 Laporan	323,400,000	12 Laporan	355,740,000	12 Laporan	391,314,000	12 Laporan	430,445,400	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	90%	90%	0	90%	3,000,000	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A					1 Laporan	3,300,000	1 Laporan	3,630,000	1 Laporan	3,993,000	1 Laporan	4,392,300	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar 4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	693,190,200	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1,051,477,800	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	0	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	0	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	0	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	0	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A					12 Laporan	1,156,625,360	12 Laporan	1,272,287,896	12 Laporan	1,399,516,886	12 Laporan	1,539,468,354	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian	



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi/Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kategori	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	60 Unit	60 Unit	104,104,619	60 Unit	927,000,000	60 Unit	0	60 Unit	0	60 Unit	0	60 Unit	0	60 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	N/A			80%	1,049,700,000	80%	1,154,670,000	80%	1,270,137,000	80%	1,397,150,700	80%	1,536,865,770	80%	1,536,865,770	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	32,000,000	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A			16 Unit	35,200,000	16 Unit	38,720,000	16 Unit	42,592,000	16 Unit	46,851,200	16 Unit	51,536,320	16 Unit	51,536,320	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	40,104,619	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	165,000,000	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	N/A			16 Unit	181,500,000	16 Unit	199,650,000	16 Unit	219,615,000	16 Unit	241,578,500	16 Unit	265,734,150	16 Unit	265,734,150	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	a. Jumlah Alat Besar yang dipelihara b. Jumlah Alat Besar yang diurus periznannya	a. N/A Unit b. N/A Unit	a. N/A Unit b. N/A Unit	0	a. N/A Unit b. N/A Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya	N/A Unit			1 Unit	30,000,000	1 Unit	33,000,000	1 Unit	36,300,000	1 Unit	39,930,000	1 Unit	43,923,000	1 Unit	43,923,000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	a. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara b. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diurus periznannya	a. N/A Unit b. N/A Unit	a. N/A Unit b. N/A Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	15,000,000	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. NA b. NA	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Periznannya	1 Unit			1 Unit	16,500,000	1 Unit	18,150,000	1 Unit	19,965,000	1 Unit	21,961,500	1 Unit	24,157,650	1 Unit	24,157,650	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	50 buah	50 buah	5,000,000	50 buah	50,000,000	100 buah	0	150 buah	0	200 buah	0	300 buah	0	400 buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A					34 Unit	55,000,000	34 Unit	60,500,000	34 Unit	66,550,000	34 Unit	73,205,000	34 Unit	80,525,500	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 buah	13 buah	0	13 buah	425,000,000	25 buah	0	25 buah	0	50 buah	0	50 buah	0	50 buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	N/A					11 Unit	467,500,000	11 Unit	514,250,000	11 Unit	565,675,000	11 Unit	622,242,500	11 Unit	684,466,750	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/ruah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	120 M2	120 M2	50,000,000	120 M2	240,000,000	120 M2	0	120 M2	0	120 M2	0	120 M2	0	120 M2	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Mki/Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A			1 Unit	284.000,000	1 Unit	290.400,000	1 Unit	319.440,000	1 Unit	351.384,000	1 Unit	386.522,400	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	a. 100% b. 80%	a. 100% b. 80%	0	a. 100% b. 80%	0	a. 100% b. 80%	75.000,000	a. 100% b. 80%	82.500,000	a. 100% b. 80%	90.750,000	a. 100% b. 80%	99.825,000	a. 100% b. 80%	109.807,500	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	28 Stel	28 Stel	0	28 Stel	0	28 Stel	0	28 Stel	0	28 Stel	0	28 Stel	0	28 Stel	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A			1 Paket	50.000,000	1 Paket	55.000,000	1 Paket	60.500,000	1 Paket	66.550,000	1 Paket	73.205,000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	75 Orang	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang			75 Orang	25.000,000	75 Orang	27.500,000	75 Orang	30.250,000	75 Orang	33.275,000	75 Orang	36.602,500	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%	330.948,897	100%	161.134,569	100%	177.248,028	100%	194.972,829	100%	214.470,111	100%	235.917,123	100%	259.508,835	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Trantib b. Kasi Kesos
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	4 Laporan	4 Laporan	330.948,897	4 Laporan	143.821,913	4 Laporan	158.204,104	4 Laporan	174.024,514	4 Laporan	191.426,986	4 Laporan	210.569,662	4 Laporan	231.626,629	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Trantib b. Kasi Kesos
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	a. Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pembinaan Linmas yang dilaksanakan	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	237.516,700	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	48.766,289	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A			4 Laporan	53.642,896	4 Laporan	59.007,188	4 Laporan	64.907,904	4 Laporan	71.398,095	4 Laporan	78.538,564	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib		
		Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	102.432,197	3 Kegiatan	95.055,644	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Kesos
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Hamonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A			3 Laporan	104.561,208	3 Laporan	115.017,329	3 Laporan	126.519,062	3 Laporan	139.170,968	3 Laporan	153.088,065	Kecamatan Gedangan	Kasi Kesos		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	4 permasalahan	4 permasalahan	0	4 permasalahan	17.312,656	4 permasalahan	19.043,922	4 permasalahan	20.948,314	4 permasalahan	23.043,146	4 permasalahan	25.347,460	4 permasalahan	27.882,206	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Eupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah operasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan b. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdaftar c. Jumlah monev bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	17,312,656	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	NA	NA	NA	NA	4 Laporan	19,043,922	4 Laporan	20,948,314	4 Laporan	23,043,140	4 Laporan	25,347,460	4 Laporan	27,882,208	NA	NA	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebelum dan sesudah SAKIP sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Misi 1 pada RPJMD:								
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha								
Sasaran Misi 5 pada RPJMD								
Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram								
Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Target capaian kinerja						Kondisi Kinerja Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Tujuan 1:								
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum								
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.072 (Sangat Baik)	89.1 (Sangat Baik)	89.1 (Sangat Baik)	89.2 (Sangat Baik)	89.3 (Sangat Baik)	89.5 (Sangat Baik)	89.4 (Sangat Baik)	89.5 (Sangat Baik)
Sasaran 1:								
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan								
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	N/A	N/A	89.1 (Sangat Baik)	89.1 (Sangat Baik)	89.2 (Sangat Baik)	89.3 (Sangat Baik)	89.4 (Sangat Baik)	89.4 (Sangat Baik)
Nilai SAKIP	70,9 (BB)	76 (BB)	80 (A)	80.1 (A)	80.2 (A)	80.3 (A)	80.4 (A)	80.4 (A)
Nilai RB	N/A	N/A	27.22	28	29	30	31	31
Nilai IPP	N/A	N/A	4.51 (A)	4.55 (A)	4.60 (A)	4.65 (A)	4.65 (A)	4.65 (A)
Prosentase serapan anggaran	N/A	N/A	90%	90.25%	90.50%	90.75%	91%	91%
Sasaran 2:								
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum								
Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan sampai dengan Tahun 2026 dan juga dapat digunakan sebagai pedoman transisi yaitu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Tahun 2026, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan pada saat transisi penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan periode berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Gedangan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Kecamatan Gedangan ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Gedangan harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Kecamatan Gedangan
PEMERINTAH KABUPATEN
Kecamatan Gedangan
SIDOARJO
KAMAT GEDANGAN
NIBRE W I SETIAWATI, S.STP, MPA

Pembina Tingkat I
NIP. 19770924 199701 2001



LAMPIRAN

1. Matrik Renstra 2021-2026
2. Cascading / Pohon Kinerja
3. Surat Keputusan Tim Penyusun

Kecamatan Gedangan

**MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, ketentraman dan ketertiban umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	a.100% b.80% c.100%	a.100% b.80% c.100%	1.951.043.903	a.100% b.80% c.100%	1.553.003.419	a.100% b.85% c.100%	1.708.303.761	a.100% b.90% c.100%	1.879.134.137	a.100% b.90% c.100%	2.067.047.550	a.100% b.95% c.100%	2.273.752.306	a.100% b.95% c.100%	2.501.127.536	Kecamatan Gedangan	Camat
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	9600 Berkas	9600 Berkas	39.427.700	9600 Berkas	254.967.628	9600 Berkas	280.464.391	9800 Berkas	308.510.830	10000 Berkas	339.361.913	12000 Berkas	373.298.104	12000 Berkas	410.627.915	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Jumlah pelayanan umum yang diterima b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	a.9600 Berkas b.60 Orang	a.9600 Berkas b.60 Orang	39.427.700	a.9600 Berkas b.60 Orang	254.967.628	a.9600 Berkas b.100 Orang	0	a.9800 Berkas b.100 Orang	0	a.10000 Berkas b.100 Orang	0	a.12000 Berkas b.100 Orang	0	a.12000 Berkas b.100 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A			1 Laporan	280.464.391	1 Laporan	308.510.830	1 Laporan	339.361.913	1 Laporan	373.298.104	1 Laporan	410.627.915	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	215.088.100	8 Laporan	267.733.603	8 Laporan	294.506.963	8 Laporan	323.957.659	8 Laporan	356.353.425	8 Laporan	391.988.768	8 Laporan	431.187.645	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesos d. Kasi Pembangunan
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan d. Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d. 2 kegiatan	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d. 2 kegiatan	215.088.100	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d. 2 kegiatan	267.733.603	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesos d. Kasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A			4 Laporan	294.506.963	4 Laporan	323.957.659	4 Laporan	356.353.425	4 Laporan	391.988.768	4 Laporan	431.187.645	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesos d. Kasi Pembangunan		

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan			
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
					21		22		23		24		25		26						
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan 2. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun 3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.696.528.103	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.030.302.188	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.133.332.407	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.246.665.647	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.371.332.212	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.508.465.434	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.659.311.976	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembangunan	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar	75 berkas	75 berkas	2.903.175	75 berkas	18.626.200	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	N/A					1 Dokumen	20.488.820	1 Dokumen	22.537.702	1 Dokumen	24.791.472	1 Dokumen	27.270.619	1 Dokumen	29.997.681		Kecamatan Gedangan	Kasi Pembangunan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	a. Jumlah monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan b. Jumlah monev bidang pembangunan dan lingkungan c. Jumlah monev bidang pemerintahan d. Jumlah monev bidang perekonomian	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	1.500.000	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	20.689.540	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesos d. Kasi Pembangunan	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	N/A					4 Laporan	22.758.494	4 Laporan	25.034.343	4 Laporan	27.537.778	4 Laporan	30.291.556	4 Laporan	33.320.711		Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesos
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	a. Jumlah kegiatan pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang telah dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan c. Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	1.692.124.928	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	990.986.448	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	a. Kasi perekonomian b. Kasi Pembangunan Fisik	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A					2 Laporan	1.090.085.093	2 Laporan	1.199.093.602	2 Laporan	1.319.002.962	2 Laporan	1.450.903.259	2 Laporan	1.595.993.584		Kecamatan Gedangan	Kasi perekonomian
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100.325.368	100%	122.568.203	100%	299.825.023	100%	329.807.525	100%	362.788.278	100%	399.067.106	100%	438.973.816		Kecamatan Gedangan	Kasi Transtib
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.325.368	2 Kegiatan	122.568.203	1 Kegiatan	299.825.023	1 Kegiatan	329.807.525	1 Kegiatan	362.788.278	1 Kegiatan	399.067.106	1 Kegiatan	438.973.816		Kecamatan Gedangan	Kasi Transtib

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					21		22		23		24		25		26					
1	2	18	19	20	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	27	28		
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan b. Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional	a. 2 Kegiatan b.1 Kegiatan	a. 2 Kegiatan b.1 Kegiatan	100.325.368	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	122.568.203	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	N/A					100 Orang	134.825.023	100 Orang	148.307.525	100 Orang	163.138.278	100 Orang	179.452.106	100 Orang	197.397.316	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan FORKOPIMKA yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A					1 Dokumen	79.000.000	1 Dokumen	86.900.000	1 Dokumen	95.590.000	1 Dokumen	105.149.000	1 Dokumen	115.663.900	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pilkada, pileg, pilpres	15 Desa	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	N/A					3 Lembaga Masyarakat	86.000.000	3 Lembaga Masyarakat	94.600.000	3 Lembaga Masyarakat	104.060.000	3 Lembaga Masyarakat	114.466.000	3 Lembaga Masyarakat	125.912.600	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	26.613.300	100%	25.479.000	100%	96.026.900	100%	105.629.590	100%	116.192.549	100%	127.811.804	100%	140.592.984	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	15 Desa	15 Desa	26.613.300	15 Desa	25.479.000	15 Desa	96.026.900	15 Desa	105.629.590	15 Desa	116.192.549	15 Desa	127.811.804	15 Desa	140.592.984	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) & subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					21		22		23		24		25		26					
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi b. Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi	a. 15 desa b. 15 Desa	a. 15 desa b. 15 Desa	8.810.400	a. 15 desa b. 15 Desa	8.660.000	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A			2 Dokumen	9.526.000	2 Dokumen	10.478.600	2 Dokumen	11.526.460	2 Dokumen	12.679.106	2 Dokumen	13.947.017	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	17.802.900	15 Kegiatan	16.819.000	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	N/A			4 Dokumen	18.500.900	4 Dokumen	20.350.990	4 Dokumen	22.386.089	4 Dokumen	24.624.698	4 Dokumen	27.087.168	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan		
		Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	N/A Dokumen	N/A Dokumen		N/A Dokumen	0	N/A Dokumen	0	N/A Dokumen	0	N/A Dokumen	0	N/A Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	N/A			4 Dokumen	68.000.000	4 Dokumen	74.800.000	4 Dokumen	82.280.000	4 Dokumen	90.508.000	4 Dokumen	99.558.800	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	4.909.220.779	100%	15.671.248.007	100%	17.275.372.808	100%	19.002.910.088	100%	20.903.201.098	100%	22.993.521.207	100%	25.292.873.328	Kecamatan Gedangan	Sekretariat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	51.273.418	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	174.513.802	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
			1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan 2. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	N/A			1. 5 Dokumen 2. 8 Dokumen	191.965.182	1. 5 Dokumen 2. 8 Dokumen	211.161.700	1. 5 Dokumen 2. 8 Dokumen	232.277.870	1. 5 Dokumen 2. 8 Dokumen	255.505.657	1. 5 Dokumen 2. 8 Dokumen	281.056.223	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	367.702	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 dokumen	404.472	2 dokumen	444.919	2 dokumen	489.411	2 dokumen	538.352	2 dokumen	592.187	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	280.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	308.000	1 Dokumen	338.800	1 Dokumen	372.680	1 Dokumen	409.948	1 Dokumen	450.943	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	280.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					20		21		22		23		24		25		26			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	308.000	1 Dokumen	338.800	1 Dokumen	372.680	1 Dokumen	409.948	1 Dokumen	450.943	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	280.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	308.000	1 Dokumen	338.800	1 Dokumen	372.680	1 Dokumen	409.948	1 Dokumen	450.943	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	280.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	308.000	1 Dokumen	338.800	1 Dokumen	372.680	1 Dokumen	409.948	1 Dokumen	450.943	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	616.785	2 dokumen	525.000	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A				2 Laporan	577.500	2 Laporan	635.250	2 Laporan	698.775	2 Laporan	768.653	2 Laporan	845.518	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	656.633	4 Dokumen	172.501.100	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A				4 Laporan	189.751.210	4 Laporan	208.726.331	4 Laporan	229.598.964	4 Laporan	252.558.861	4 Laporan	277.814.747	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	90%	90%	3.630.528.362	90%	3.908.233.577	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	N/A				90%	4.299.056.935	90%	4.728.962.629	90%	5.201.858.891	90%	5.722.044.780	90%	6.294.249.259	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	25 Orang	25 Orang	3.629.470.967	25 Orang	3.899.628.560	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A				25 Orang/bulan	4.289.591.416	25 Orang/bulan	4.718.550.558	25 Orang/bulan	5.190.405.613	25 Orang/bulan	5.709.446.175	25 Orang/bulan	6.280.390.792	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A				1 Dokumen	1.650.000	1 Dokumen	1.815.000	1 Dokumen	1.996.500	1 Dokumen	2.196.150	1 Dokumen	2.415.765	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					20		21		22		23		24		25		26			
1	2	18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	100 SPM	100 SPM	0	100 SPM	1.230.017	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A					1 Dokumen	1.353.019	1 Dokumen	1.488.321	1 Dokumen	1.637.153	1 Dokumen	1.800.868	1 Dokumen	1.980.955	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A					1 Laporan	2.750.000	1 Laporan	3.025.000	1 Laporan	3.327.500	1 Laporan	3.660.250	1 Laporan	4.026.275	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	1.057.395	12 Laporan	3.375.000	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan					12 Laporan	3.712.500	12 Laporan	4.083.750	12 Laporan	4.492.125	12 Laporan	4.941.338	12 Laporan	5.435.471	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD PD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD PD yang telah tersertifikasi	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	5.452.005	a. 90% b. 90%	5.366.140	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	a. N/A b. N/A					a. 90% b. 0%	10.870.754	a. 90% b. 0%	11.957.829	a. 90% b. 0%	13.153.612	a. 90% b. 0%	14.468.974	a. 90% b. 0%	15.915.871	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD PD yang disusun tepat waktu	3 Laporan	3 Laporan	5.452.005	3 Laporan	5.366.140	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan					4 Laporan	5.902.754	4 Laporan	6.493.029	4 Laporan	7.142.332	4 Laporan	7.856.566	4 Laporan	8.642.222	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan 2. Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	a. N/A Laporan b. N/A Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A					4 Laporan	4.968.000	4 Laporan	5.464.800	4 Laporan	6.011.280	4 Laporan	6.612.408	4 Laporan	7.273.649	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase alat dan bahan penunjang yang disediakan	90%	90%	305.072.175	90%	1.022.201.097	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	N/A					89,1 Nilai	1.124.421.207	89,1 Nilai	1.236.863.328	89,1 Nilai	1.360.549.660	89,1 Nilai	1.496.604.627	89,1 Nilai	1.646.265.089	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	124 Buah	124 Buah	4.145.937	124 Buah	18.352.695	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

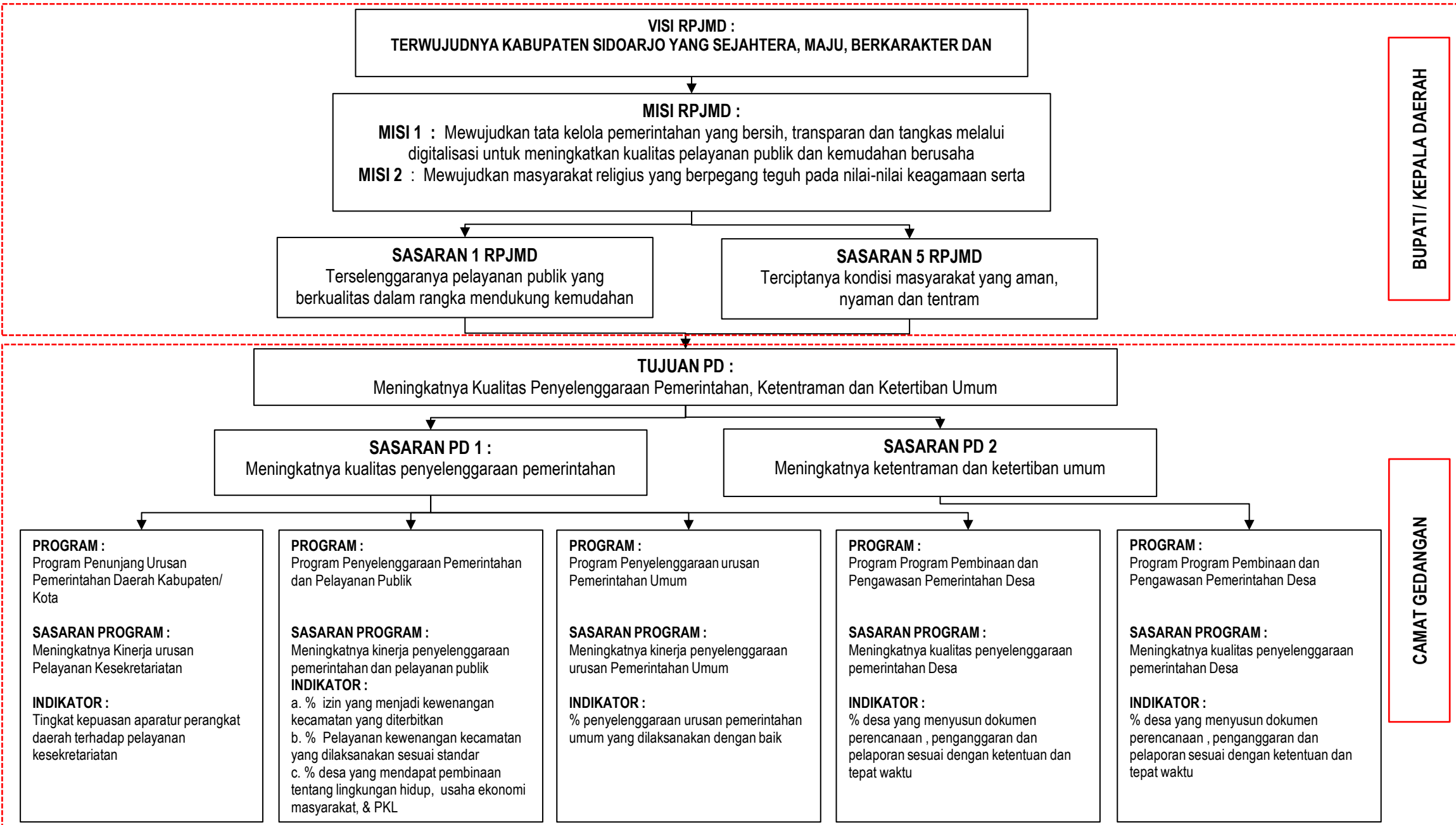
Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					21		22		23		24		25		26					
1	2	18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A			1 Paket	20.187.965	1 Paket	22.206.762	1 Paket	24.427.438	1 Paket	26.870.181	1 Paket	29.557.200	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	13 buah	13 buah	48.898.809	645 Buah	381.826.258	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A			7 Paket	420.008.884	7 Paket	462.009.772	7 Paket	508.210.750	7 Paket	559.031.825	7 Paket	614.935.007	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	0	5 Jenis	338.205	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A			1 Paket	372.026	1 Paket	409.229	1 Paket	450.151	1 Paket	495.167	1 Paket	544.683	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	1. 8 Orang 2. N/A	1. 8 Orang 2. N/A	132.000.000	1. 8 Orang 2. N/A	173.800.000	1. 8 Orang 2. N/A	0	1. 8 Orang 2. N/A	0	1. 8 Orang 2. N/A	0	1. 8 Orang 2. N/A	0	1. 8 Orang 2. N/A	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A			1 Paket	191.180.000	1 Paket	210.298.000	1 Paket	231.327.800	1 Paket	254.460.580	1 Paket	279.906.638	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	2.352.038	600 Buah	91.627.212	600 Buah	0	600 Buah	0	600 Buah	0	600 Buah	0	600 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A			1 Paket	100.789.933	1 Paket	110.868.926	1 Paket	121.955.819	1 Paket	134.151.401	1 Paket	147.566.541	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3.182.820	3 Jenis	5.124.984	3 Jenis	0	3 Jenis	0	3 Jenis	0	3 Jenis	0	3 Jenis	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	N/A			3 Dokumen	5.637.482	3 Dokumen	6.201.230	3 Dokumen	6.821.353	3 Dokumen	7.503.489	3 Dokumen	8.253.837	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	4 Laporan	4 Laporan	0	4 Laporan	8.905.743	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A			Paket	9.796.317	Paket	10.775.949	Paket	11.853.544	Paket	13.038.898	Paket	14.342.788	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan b. Prosentase kunjungan tamu yang difasilitasi	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	39.092.960	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	92.226.000	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	N/A			4 Laporan	101.448.600	4 Laporan	111.593.460	4 Laporan	122.752.806	4 Laporan	135.028.087	4 Laporan	148.530.895	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	100%	75.399.611	100%	250.000.000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A			2 Laporan	275.000.000	2 Laporan	302.500.000	2 Laporan	332.750.000	2 Laporan	366.025.000	2 Laporan	402.627.500	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					21		22		23		24		25		26					
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	65 Buah	65 Buah	0	65 Buah	8.283.955.791	65 Buah	0	65 Buah	0	65 Buah	0	65 Buah	0	65 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah BMD yang diadakan	N/A				108 Jenis	9.039.383.370	108 Jenis	9.943.321.706	108 Jenis	10.937.653.878	108 Jenis	12.031.419.265	108 Jenis	13.234.561.192	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	N/A Unit	N/A Unit	0	1 Unit	96.000.000	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A				1 Unit	105.600.000	1 Unit	116.160.000	1 Unit	127.776.000	1 Unit	140.553.600	1 Unit	154.608.960	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	N/A Unit	N/A Unit	0	2 Unit	96.000.000	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A				2 Unit	105.600.000	2 Unit	116.160.000	2 Unit	127.776.000	2 Unit	140.553.600	2 Unit	154.608.960	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	N/A Unit	N/A Unit	0	N/A Unit	50.000.000	N/A Unit	0	N/A Unit	0	N/A Unit	0	N/A Unit	0	N/A Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	N/A				1 Unit	55.000.000	1 Unit	60.500.000	1 Unit	66.550.000	1 Unit	73.205.000	1 Unit	80.525.500	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	23 Buah	23 Buah	0	100 Buah	706.602.705	23 Buah	0	23 Buah	0	23 Buah	0	23 Buah	0	23 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A				107 Unit	777.262.976	107 Unit	854.989.274	107 Unit	940.488.201	107 Unit	1.034.537.021	107 Unit	1.137.990.723	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	70 Buah	70 Buah	0	10 Buah	705.353.086	70 Buah	0	70 Buah	0	70 Buah	0	70 Buah	0	70 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A				59 Unit	775.888.395	59 Unit	853.477.235	59 Unit	938.824.958	59 Unit	1.032.707.454	59 Unit	1.135.978.199	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Gedung	1 Gedung	0	1 Gedung	6.630.000.000	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A				1 Unit	7.220.031.999	1 Unit	7.942.035.198	1 Unit	8.736.238.719	1 Unit	9.609.862.590	1 Unit	10.570.848.850	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	90%	90%	812.790.200	90%	1.349.977.600	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	N/A				90%	1.484.975.360	90%	1.632.472.896	90%	1.796.820.186	90%	1.976.502.204	90%	2.174.152.425	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1700 Surat	1700 Surat	0	1700 Surat	1.500.000	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A				1 Laporan	1.650.000	1 Laporan	1.815.000	1 Laporan	1.996.500	1 Laporan	2.196.150	1 Laporan	2.415.765	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	12 bulan	119.600.000	12 bulan	294.000.000	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) & subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					21		22		23		24		25		26					
1	2	18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A			12 Laporan	323.400.000	12 Laporan	355.740.000	12 Laporan	391.314.000	12 Laporan	430.445.400	12 Laporan	473.489.940	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	90%	90%	0	90%	3.000.000	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A			1 Laporan	3.300.000	1 Laporan	3.630.000	1 Laporan	3.993.000	1 Laporan	4.392.300	1 Laporan	4.831.530	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; 4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	693.190.200	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1.051.477.600	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	0	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	0	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	0	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A			12 Laporan	1.156.625.360	12 Laporan	1.272.287.896	12 Laporan	1.399.516.686	12 Laporan	1.539.468.354	12 Laporan	1.693.415.190	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	60 Unit	60 Unit	104.104.619	60 Unit	927.000.000	60 Unit	0	60 Unit	0	60 Unit	0	60 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	N/A			80%	1.049.700.000	80%	1.154.670.000	80%	1.270.137.000	80%	1.397.150.700	80%	1.536.865.770	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit		1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	32.000.000	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	N/A			16 Unit	35.200.000	16 Unit	38.720.000	16 Unit	42.592.000	16 Unit	46.851.200	16 Unit	51.536.320	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	40.104.619	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	165.000.000	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. - buah 3. 16 unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A			16 Unit	181.500.000	16 Unit	199.650.000	16 Unit	219.615.000	16 Unit	241.576.500	16 Unit	265.734.150	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		

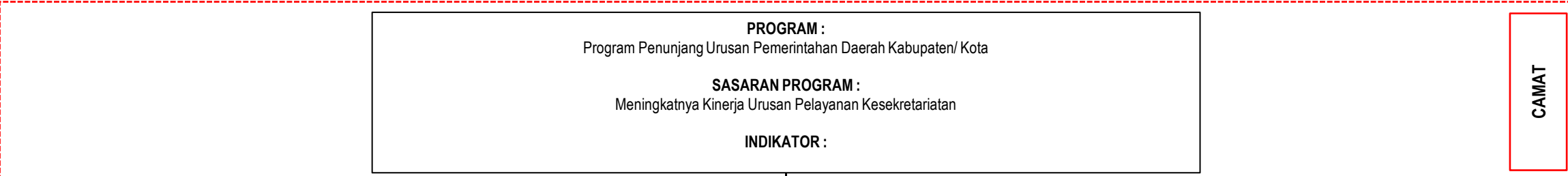
Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	a. Jumlah Alat Besar yang dipelihara b. Jumlah Alat Besar yang diurus perizinannya	a. N/A Unit b. N/A Unit	a. N/A Unit b. N/A Unit	0	a. N/A Unit b. N/A Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	N/A Unit				1 Unit	30.000.000	1 Unit	33.000.000,00	1 Unit	36.300.000,00	1 Unit	39.930.000,00	1 Unit	43.923.000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	a. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara b. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diurus perizinannya	a. N/A Unit b. N/A Unit	a. N/A Unit b. N/A Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	15.000.000	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. NA b. NA	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit				1 Unit	16.500.000	1 Unit	18.150.000	1 Unit	19.965.000	1 Unit	21.961.500	1 Unit	24.157.650	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	50 buah	50 buah	5.000.000	50 buah	50.000.000	100 buah	0	150 buah	0	200 buah	0	300 buah	0	400 buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A				34 Unit	55.000.000	34 Unit	60.500.000	34 Unit	66.550.000	34 Unit	73.205.000	34 Unit	80.525.500	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 buah	13 buah	0	13 buah	425.000.000	25 buah	0	25 buah	0	50 buah	0	50 buah	0	50 buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	N/A				11 Unit	467.500.000	11 Unit	514.250.000	11 Unit	565.675.000	11 Unit	622.242.500	11 Unit	684.466.750	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/ rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	120 M2	120 M2	59.000.000	120 M2	240.000.000	120 M2	0	120 M2	0	120 M2	0	120 M2	0	120 M2	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A				1 Unit	264.000.000	1 Unit	290.400.000	1 Unit	319.440.000	1 Unit	351.384.000	1 Unit	386.522.400	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	a. 100% b. 80%	a. 100% b. 80%	0	a. 100% b. 80%	0	a. 100% b. 80%	75.000.000	a. 100% b. 80%	82.500.000	a. 100% b. 80%	90.750.000	a. 100% b. 80%	99.825.000	a. 100% b. 80%	109.807.500	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	26 Stel	26 Stel	0	26 Stel	0	26 Stel	0	26 Stel	0	26 Stel	0	26 Stel	0	26 Stel	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A				1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.500.000	1 Paket	66.550.000	1 Paket	73.205.000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	75 Orang	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang				75 Orang	25.000.000	75 Orang	27.500.000	75 Orang	30.250.000	75 Orang	33.275.000	75 Orang	36.602.500	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat ReliOUS vane		Program Koordinasi Ketentraman Dan Keterlibatan Umum	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%	339.948.897	100%	161.134.569	100%	177.248.026	100%	194.972.829	100%	214.470.111	100%	235.917.123	100%	259.508.835	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Trantib b. Kasi Kesos

Misi Bupati	Tujuan PD	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan				
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28				
Berpegang Teguh pada Nilai Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	4 Laporan	4 Laporan	339.948.897	4 Laporan	143.821.913	4 Laporan	158.204.104	4 Laporan	174.024.514	4 Laporan	191.426.966	4 Laporan	210.569.662	4 Laporan	231.626.629	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Trantib b. Kasi Kesos		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	a. Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pembinaan Linmas yang dilaksanakan	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	237.516.700	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	48.766.269	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A				4 Laporan	53.642.896	4 Laporan	59.007.186	4 Laporan	64.907.904	4 Laporan	71.398.695	4 Laporan	78.538.564	4 Laporan	78.538.564	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	102.432.197	3 Kegiatan	95.055.644	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Kesos
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A				3 Laporan	104.561.208	3 Laporan	115.017.329	3 Laporan	126.519.062	3 Laporan	139.170.968	3 Laporan	153.088.065	3 Laporan	153.088.065	Kecamatan Gedangan	Kasi Kesos	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	4 permasalahan	4 permasalahan	0	4 permasalahan	17.312.656	4 permasalahan	19.043.922	4 permasalahan	20.948.314	4 permasalahan	23.043.146	4 permasalahan	25.347.460	4 permasalahan	27.882.206	4 permasalahan	27.882.206	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah operasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan b. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdaftar c. Jumlah move bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	17.312.656	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A				4 Laporan	19.043.922	4 Laporan	20.948.314	4 Laporan	23.043.146	4 Laporan	25.347.460	4 Laporan	27.882.206	4 Laporan	27.882.206	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib	

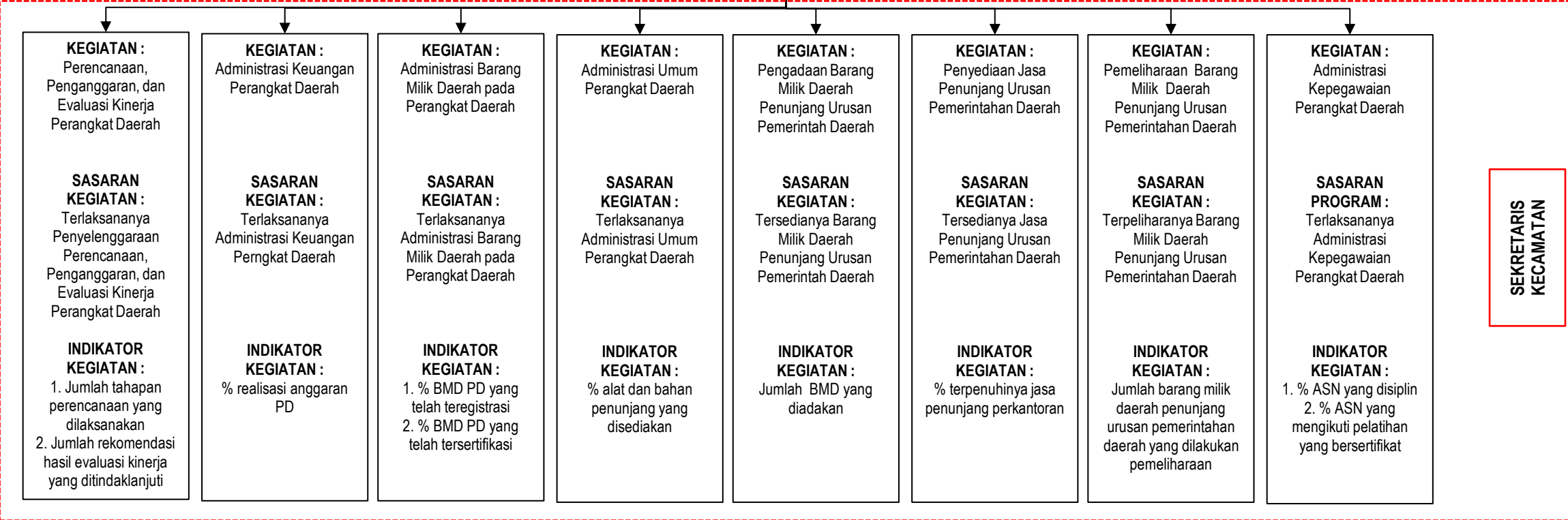


BUPATI/KEPALA DAERAH

CAMAT GEDANGAN



CAMAT



SEKRETARIS KECAMATAN

PROGRAM :
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
SASARAN PROGRAM :
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
INDIKATOR :
a. % izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan
b. % pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar
c. % desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL

PROGRAM :
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
SASARAN PROGRAM :
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
INDIKATOR :
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik

PROGRAM :
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
SASARAN PROGRAM :
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
INDIKATOR :
Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu

PROGRAM :
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
SASARAN PROGRAM :
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa
INDIKATOR :
Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu

LEVEL ES. III (KA PD / CAMAT)

KEGIATAN :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
SASARAN KEGIATAN :
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
INDIKATOR KEGIATAN :
Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti

KEGIATAN :
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
SASARAN KEGIATAN :
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
INDIKATOR KEGIATAN :
Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun

KEGIATAN :
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
SASARAN KEGIATAN :
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
INDIKATOR KEGIATAN :
1. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan
2. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun
3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun

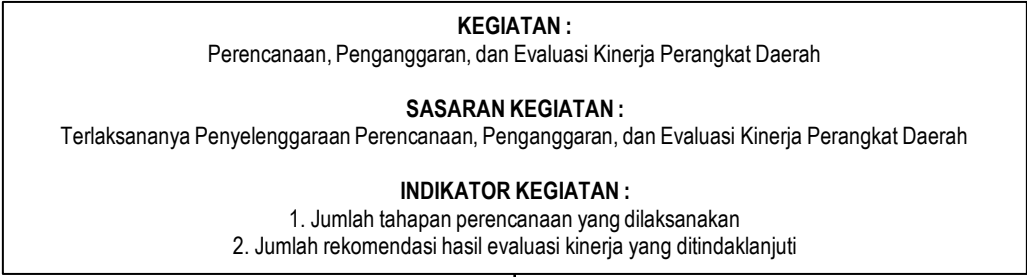
KEGIATAN :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
SASARAN KEGIATAN :
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
INDIKATOR KEGIATAN :
Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan

KEGIATAN :
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
SASARAN KEGIATAN :
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
INDIKATOR KEGIATAN :
Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu

KEGIATAN :
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman & Ketertiban Umum
SASARAN KEGIATAN :
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman & Ketertiban Umum
INDIKATOR KEGIATAN :
Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun

KEGIATAN :
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
SASARAN KEGIATAN :
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
INDIKATOR KEGIATAN :
Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun

LEVEL ES. III (SEKRETARIS KECAMATAN / PPTK)



LEVEL ES. III (SEKRETARIS)



LEVEL ES. IV (KASUBBAG PK)



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN GEDANGAN

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan

Telepon. 031-8914060/031-8010460

Email : gedangan@sidoarjokab.go.id Website : gedangan.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN

CAMAT GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR: 188/ 37/438.7.4/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026

CAMAT GEDANGAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 27 Desember 2021, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026;
- b. Bahwa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 tahun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Gedangan maka perlu menetapkan Tim Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021- 2026 dengan Keputusan Camat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah KotaPraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran daerah kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 22);
20. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019;
21. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Tahun 2021);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
27. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
28. Peraturan bupati Sidoarjo No. 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
29. Peraturan bupati Sidoarjo No. 77 Tahun 2022 Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
30. Peraturan bupati Sidoarjo No. 80 Tahun 2022 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor: 050/63/438.6.1/2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan atas sub kegiatan beserta indikatornya yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, sedangkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 untuk Program, indikator Program beserta target program dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah tetap;
2. Melakukan evaluasi atas capaian dan target indikator kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2021;
3. Melakukan perubahan atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang terkait dengan sub kegiatan beserta indikatornya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 dan mengevaluasi kebutuhan kapasitas fiskalnya sesuai pagu program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
4. Menyusun Rancangan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan Sistematis dan matriks Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
5. Melakukan evaluasi atas capaian Rencana Strategis Daerah Perangkat daerah berdasarkan capaian kinerja Tahun 2021 dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas Bupati Sidoarjo.

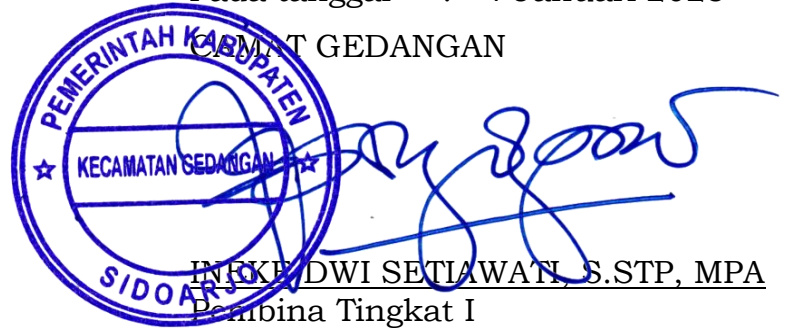
KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GEDANGAN

Pada tanggal : 4 Januari 2023

KABUPATEN GEDANGAN
KECAMATAN GEDANGAN
SIDOARJO



ENKE DWI SETIAWAN, S.STP, MPA

Pembina Tingkat I

NIP. 19770924 199701 2 001

Lampiran Keputusan Camat Gedangan
Nomor : 188/ 37/438.7.4/2023
Tanggal : 4 Januari 2023

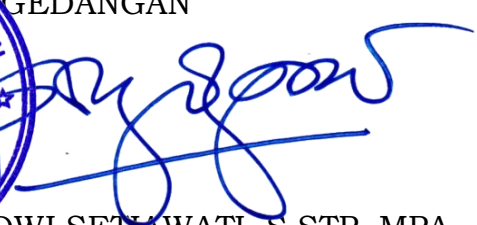
TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026
DI KECAMATAN GEDANGAN

- Penanggungjawab : Camat Gedangan
Ketua : Sekretaris Kecamatan Gedangan
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Gedangan
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gedangan
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Gedangan
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedangan
4. Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Gedangan
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Gedangan
6. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Gedangan
7. Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Gedangan

Ditetapkan di : GEDANGAN
Pada tanggal : 4 Januari 2023



CAMAT GEDANGAN


IREKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA
Pembina Tingkat I
NIP. 19770924 199701 2 001